

Revitalisasi Fasilitas *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*



M. Fatchurahman
Asep Solikin

Revitalisasi Fasilitas Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Oleh:

M. Fatchurahman

Asep Solikin

International Research and Development for Human Beings

Malang

2018

Penulis : M. Fatchurahman dan Asep Solikin
ISBN : 978-602-6672-79-7
Editor : Cakti Indra Gunawan, SE., MM., Ph.D
Layout : Bayu Febri Basudewo, SE.
Cover : Moh. Askiyanto, SE., MM

Cetakan Pertama, Agustus 2018

Diterbitkan oleh:



CV. IRDH (Research & Publishing)

Anggota IKAPI No. 159-JTE -2017

Office: Jl. A. Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto

New Villa Bukit Sengkaling C9 No.1 Malang

HP. 081 357 217 319 WA. 089 621 424 412

www.irdhcenter.com email: irdhresearch@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul: ***“Revitalisasi Fasilitas Bimbingan dan Konseling di Sekolah”*** ini dapat diselesaikan oleh penulis. Buku ini disusun merupakan inspirasi dari hasil penelitian yang berjudul: ***“Revitalisasi Fasilitas Pelayanan Bimbingan dan Konseling Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Palangka Raya”*** yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tahun 2017.

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh bimbingan dan konseling dalam konteks pelaksanaannya di lapangan, khususnya berkenaan dengan fasilitas pelayanan berupa sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang belum memenuhi standar (sesuai ketentuan yang berlaku).

Buku ini berisikan tentang (1) Pendahuluan, yang sedikit menguraikan berbagai problematika yang dihadapi oleh bimbingan dan konseling ketika pelaksanaannya di lapangan, baik secara eksternal maupun internal. (2) Konsep dasar bimbingan dan konseling, yang meliputi landasan, fungsi, prinsip dan asas serta tujuan dari bimbingan dan konseling. (3) Komponen program bimbingan dan konseling, meliputi konsep dan komponen program bimbingan dan konseling. (4) Pelayanan Bimbingan dan Konseling, meliputi pengertian dan jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling. (5) Keadaan fasilitas bimbingan dan konseling saat ini, yang menguraikan kondisi dari fasilitas bimbingan dan konseling yang sesungguhnya terjadi di lapangan (sekolah/madrasah) berdasarkan hasil dari beberapa penelitian. (6) Konsep revitalisasi fasilitas bimbingan dan konseling, menguraikan tentang pengertian dari revitalisasi, tujuan dan

fungsi revitalisasi fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling, serta revitalisasi fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling. (8) Standarisasi fasilitas: sarasa dan prasarana bimbingan dan konseling, sesuai dengan ketentuan peraturan BNSP 2006, ABKIN 2007 dan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014. (8) Upaya pemenuhan standarisasi fasilitas bimbingan dan konseling, meliputi usaha yang dilakukan oleh konselor dengan berbagai pendekatan pada pihak terkait. (9) Unjuk kerja konselor, meliputi definisi, bentuk-bentuk dan evaluasi unjuk kinerja konselor, dan (10) Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

Penyusunan buku ini tentunya tidak lepas dari berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak, karena itu selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Namun demikian penulis berharap adanya kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan buku ini dikemudian hari.

Semoga Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang memberkati kita semua. Aamiin.

Palangka Raya, 5 Juni 2018

Penulis,

M. Fatchurahman
Asep Solikin

Daftar Isi

| | Halaman |
|--|---------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Gambar | v |
| 1. Pendahuluan | 1 |
| 2. Konsep Dasar Bimbingan Dan Konseling | 9 |
| 3. Komponen Program Bimbingan Dan Konselng | 30 |
| 4. Pelayanan Bimbingan Dan Konseling | 51 |
| 5. Keadaan Fasilitas Bimbingan Dan Konseling Saat Ini | 69 |
| 6. Konsep Revitalisasi Fasilitas Bimbingan Dan Konseling | 75 |
| 7. Standarisasi Fasilitas: Sarana Dan Prasarana Bimbingan Dan Konseling | 84 |
| 8. Upaya Pemenuhan Standarisasi Fasilitas Bimbingan dan Konseling | 92 |
| 9. Unjuk Kerja Konselor Sekolah | 97 |
| 10. Kesimpulan | 110 |
| Daftar Pustaka | 111 |
| Glosarium | 119 |
| Indeks | 123 |
| Biodata Penulis | 125-126 |

Daftar Gambar

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 3.1 : Komponen Program Bimbingan dan Konseling | 32 |
| Gambar 6.1 : Penataan Ruang Pelayanan Bimbingan dan Konseling | 86 |

1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan terus menerus secara sadar sehingga mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan benar, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian dan berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, peserta didik sebagai subyek dan obyek utama dari keseluruhan sistem dan proses pendidikan diharapkan mampu berkembang secara optimal.

Pada kenyataannya dalam proses pendidikan, setiap peserta didik tidak akan lepas dari permasalahan pribadi yang silih berganti yang secara langsung dapat menghambat perkembangannya. Disadari bahwa tidak semua aspek perkembangan peserta didik dan masalahnya dapat diselesaikan secara langsung melalui pengajaran, akan tetapi dibutuhkan aktivitas khusus yang mempunyai kegiatan dalam pendidikan. Aktivitas yang dimaksud adalah program layanan bimbingan dan konseling yang terarah, terpadu, dan sistematis.

Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir, melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Bimbingan dan Konseling merupakan upaya proaktif dan sistemik dalam memfasilitasi individu mencapai perkembangannya secara optimal, pengembangan perilaku efektif, pengembangan lingkungan perkembangan, dan peningkatan keberfungsian individu dalam lingkungannya. Semua perilaku tersebut merupakan proses perkembangan yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Pengampu bimbingan dan konseling adalah guru Bimbingan dan Konseling atau konselor yang merupakan salah satu kualifikasi pendidik.

Dalam Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (*self actualization*) dan pengembangan kapasitasnya (*capacity development*) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian.

Pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan bagian yang integral dari proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan tanggung jawab bersama antara personil sekolah. Pelayanan Bimbingan dan Konseling sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan dituntut untuk memiliki evaluasi terhadap berbagai layanan yang diselenggarakan. Sebagai pejabat fungsional guru bimbingan dan konseling dituntut melaksanakan berbagai tugas pokok fungsionalnya secara professional. Adapun tugas pokok guru pembimbing menurut SK Menpan No.84/1993 ada lima yaitu: (1) menyusun program BK. (2) melaksanakan program BK. (3) mengevaluasi program BK. (4) menganalisis hasil pelaksanaan BK. (5) melaksanakan tindak lanjut

dalam program BK terhadap peserta didik didik yang menjadi tanggung jawabnya. (Sukardi, 2008)

Dalam usaha penyusunan program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, selama ini program yang dibuat lebih cenderung didasarkan atas penyesuaian dengan visi dan misi sekolah bahkan cenderung disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain program yang telah disusun belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekalipun program yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ada beberapa layanan atau kegiatan dalam program tersebut yang tidak dilaksanakan.

Disamping itu guru bimbingan dan konseling dihadapkan pada permasalahan mengenai keterbatasan kemampuan dalam penguasaan teknologi yang dapat menghambat proses pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Akibat keterbatasan tersebut juga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pendukung seperti dalam penyusunan instrumen, dan penggunaan instrumen yang masih terbatas pada instrumen tertentu saja seperti observasi dan wawancara, pengolahan data hasil instrumen yang masih manual dan penghimpunan data yang tidak rutin. Oleh karena itu dibutuhkan usaha tersendiri dalam mengumpulkan data secara efektif sehingga dapat memberikan indikasi terhadap menafsirkan data yang telah terkumpul.

Selain itu guru bimbingan dan konseling juga melakukan berbagai pelayanan secara tepat guna, baik secara individu, kelompok, maupun klasikal. Dalam pelaksanaan layanan tersebut didukung oleh program yang disusun sebagai dasar pelaksanaan layanan. Program bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen atau prosedur yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Secara garis besar hambatan bimbingan dan konseling dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu: hambatan internal dan hambatan

eksternal. Hambatan *internal* dapat berupa: kompetensi konselor yang dirasa kurang atau belum memenuhi syarat. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak di temukan di berbagai sekolah SMP, MTs, MA, SMA, dan SMK, guru BK non bimbingan dan konseling, artinya konselor sekolah yang bukan berlatar pendidikan bimbingan dan konseling. Mereka diangkat oleh kepala sekolah karena dianggap mampu, meskipun secara keilmuan mereka tidak mendalami tentang teori-teori bimbingan dan konseling.

Kompetensi profesional terbentuk selain berlatar belakang pendidikan S1 dan atau S2 BK juga melalui latihan, seminar, workshop. Untuk menjadi konselor profesional memerlukan proses dan waktu. Konselor profesional membutuhkan jam terbang yang cukup matang. Di samping itu masih juga ditemukan di lapangan, adanya manajemen bimbingan dan konseling yang masih amburadul.

Suherman (2013) menjelaskan mengenai manajemen bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling perlu diurus, diatur, dikemudikan, dikendalikan, ditangani, dikelola, diselenggarakan, dijalankan, dilaksanakan dan dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian, keterampilan, serta wawasan dan pemahaman tentang arah, tujuan, fungsi, kegiatan, strategi dan indikator keberhasilannya.

Pada umumnya masalah yang biasa terjadi dimana para siswa sering lupa akan tugas dan tanggungjawabnya yang disebabkan karena over enjoy, bandel/suka melawan perintah guru, tidak patuh terhadap peraturan sekolah, susah dinasehati dan stres yang biasanya timbul dari tugas sekolah yang terlalu banyak, lingkungan keluarga ataupun lingkungan disekolah. Dari venomena ini maka akan berimbas kepada kesehatan, rasa aman, rasa percaya diri yang kurang dan kemampuan intelektual siswa itu sendiri untuk bisa beradaptasi dengan pendidikan di sekolah.

Sementara itu hambatan yang bersifat *eksternal* yaitu berupa: masih adanya anggapan bahwa layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja, anggapan bahwa bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja, keberhasilan layanan bimbingan dan konseling tergantung kepada sarana dan prasarana, konselor saja yang harus aktif sementara konseli harus/boleh pasif, menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera terlihat, dan masih adanya anggapan bahwa guru pembimbing di sekolah sebagai seorang satpan atau polisi sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari, dkk. (2013) ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan dan konseling, faktor-faktor tersebut yaitu: (1) penyusunan program bimbingan dan konseling belum sesuai dengan aspek-aspek dasar penyusunan program BK. (2) latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan profesi sebagai guru BK. (3) sarana dan prasarana adalah faktor dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan layanan BK, dan (4) kurangnya kerja sama antar personalia pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Disamping itu juga banyak ketidakpuasan pengguna layanan konseling ditujukan pada kinerja konselor dan guru pembimbing di lapangan. Penelitian Supriadi, pada umumnya mendukung fenomena tersebut dengan menemukan fakta sebagian orang tua (38%) belum mengakui signifikansi dari eksistensi program bimbingan dan konseling (BK), karena alasan kurang profesionalnya para guru pembimbing dalam menjalankan tugas (Anggraini, 2016).

Fenomena yang biasanya sering terjadi adalah dimana lingkungan sekolah yang kurang bersahabat dengan siswa di antaranya ruang belajar yang kurang memenuhi syarat, kurangnya kebersihan di sekolah, peralatan yang kurang memadai, udara yang panas, lingkungan sosial maupun alamiah dan kualitas

proses belajar dan mengajar yang sangat menentukan akan peningkatan keilmuan siswa itu sendiri.

Kurang profesionalnya guru pembimbing di sekolah disebabkan oleh dua hal yaitu guru pembimbing memang belum menunjukkan keprofesionalannya sebagai konselor profesional dan ada juga karena guru pembimbing bukan berlatar belakang bimbingan dan konseling atau guru bidang studi yang ditugaskan sebagai guru pembimbing, sehingga tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, tidak hanya dari kualitas tenaga bimbingan dan konseling, namun dari segi sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang disiapkan oleh sekolah. Ruangan BK acap kali hanyalah ruangan-ruangan parasit yang menumpang pada ruang guru atau ruang tata usaha. Bahkan juga kadang gudang-gudang yang tidak terpakailah yang kemudian disulap menjadi ruangan BK tanpa memperhatikan lagi standar ruang BK yang seharusnya. (Riyadi, Tanpa Tahun).

Padahal dengan lengkapnya berbagai sarana dan prasaran yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku, dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan siswa atau klien itu sendiri. Penelitian yang dilakukan di SMP Dorowati menghasilkan bahwa 74% peserta didik di SMP Dorowati Surabaya tidak ingin melakukan konseling dikarenakan ruang bimbingan dan konseling mereka tidak memiliki ruangan khusus sehingga tidak terjamin kerahasiaannya (Sulis, 2013).

Sesuai dengan tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa (klien) yang secara khusus diarahkan untuk membantu siswa agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, produktif dan berperilaku jujur, sehingga siswa benar benar dapat berkembang lebih optimal. Pelayanan tersebut diantaranya: layanan

orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan mediasi, dan layanan konsultasi.

B. Ruang Lingkup Revitalisasi Fasilitas Bimbingan dan Konseling di Sekolah.

Ruang lingkup dari materi buku revitalisasi fasilitas bimbingan dan konseling di Sekolah ini sebagai berikut:

1. Pendahuluan, yang sedikit menguraikan berbagai problematika yang dihadapi oleh bimbingan dan konseling ketika pelaksanaannya di lapangan, baik secara eksternal maupun internal.
2. Konsep dasar bimbingan dan konseling, yang meliputi landasan, fungsi, prinsip dan asas serta tujuan dari bimbingan dan konseling.
3. Komponen program bimbingan dan konseling, meliputi konsep dan komponen program bimbingan dan konseling.
4. Pelayanan Bimbingan dan Konseling, meliputi jenis-jenis pelayanan dan prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling
5. Keadaan fasilitas bimbingan dan konseling saat ini, yang menguraikan kondisi dari fasilitas bimbingan dan konseling yang sesungguhnya terjadi di lapangan (sekolah/madrasah) berdasarkan hasil dari beberapa penelitian.
6. Konsep revitalisasi fasilitas bimbingan dan konseling, menguraikan tentang pengertian dari revitalisasi, tujuan dan fungsi revitalisasi fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling, serta revitalisasi fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling.
7. Standarisasi fasilitas: sarasa dan prasarana bimbingan dan konseling, sesuai dengan ketentuan peraturan BNSP 2006, ABKIN 2007 dan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014.

8. Upaya pemenuhan standarisasi fasilitas bimbingan dan konseling, meliputi usaha yang dilakukan oleh konselor dengan berbagai pendekatan pada pihak terkait.
9. Unjuk kerja konselor, meliputi definisi, bentuk-bentuk dan evaluasi unjuk kinerja konselor, dan
10. Penutup, yang berisikan kesimpulan.

-----ooo0ooo-----

2 Konsep Dasar Bimbingan Dan Konseling

Pada pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, guru memiliki peranan yang sangat penting karena guru merupakan sumber yang sangat menguasai informasi tentang keadaan siswa. Di dalam melakukan bimbingan dan konseling, kerja sama konselor dengan personel lain di sekolah merupakan suatu syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Kerjasama ini akan menjamin tersusunnya program bimbingan dan konseling yang komprehensif, memenuhi sasaran, serta realistik.

Kerjasama antar seluruh personel sekolah memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dengan tercipta kerjasama yang baik antar seluruh personel sekolah maka program-program bimbingan dan konseling akan berjalan dengan lancar dan seluruh fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan baik.

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus berangkat dan berpijak dari suatu landasan yang kokoh, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Dengan adanya pijakan yang jelas dan kokoh diharapkan pengembangan layanan bimbingan dan konseling, baik dalam tataran teoritik maupun praktek, dapat semakin lebih mantap dan bisa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat

besar bagi kehidupan, khususnya bagi para penerima jasa layanan (peserta didik).

Agar aktivitas dalam layanan bimbingan dan konseling tidak terjebak dalam berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya pihak para penerima jasa layanan (peserta didik) maka pemahaman dan penguasaan tentang landasan bimbingan dan konseling khususnya oleh para konselor tampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi mutlak adanya.

Berbagai kesalahkaprahan dan kasus malpraktek yang terjadi dalam layanan bimbingan dan konseling selama ini, seperti adanya anggapan bahwa bimbingan dan konseling sebagai “polisi sekolah”, atau berbagai persepsi lainnya yang keliru tentang layanan bimbingan dan konseling, sangat mungkin memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pemahaman dan penguasaan guru bimbingan dan konseling tentang landasan bimbingan dan konseling. Dengan kata lain, penyelenggaraan bimbingan dan konseling dilakukan secara asal-asalan, tidak dibangun di atas landasan yang seharusnya.

A. Landasan Bimbingan dan Konseling

Dalam upaya memberikan pemahaman tentang landasan bimbingan dan konseling, khususnya bagi para konselor dan guru pembimbingan di lembaga formal memahami konten landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial-budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis harus dipahami oleh konselor dalam setiap pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di

sekolah. Hal ini merupakan landasan yang dapat memberikan arahan bagi setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Dari berbagai aliran filsafat, para penulis barat seperti Victor Frankl, Patterson, Alblaster & Lukes, Thompson & Rudolph, dalam Prayitno dan Amti (2004) mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut :

- (a) Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berfikir dan memper-gunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya.
- (b) Manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya.
- (c) Manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadi-kan dirinya sendiri khususnya melalui pendidikan.
- (d) Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk dan hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan.
- (e) Manusia memiliki dimensi fisik, psikologis dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam.
- (f) Manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dan kebahagiaan manusia terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri.
- (g) Manusia adalah unik dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri.
- (h) Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasan-nya untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut perikehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah

dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu akan menjadi apa manusia itu.

- (i) Manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu.

Memahami hakikat manusia tersebut maka setiap upaya Bimbingan dan Konseling diharapkan tidak menyimpang dari hakikat tentang manusia itu sendiri. Seorang konselor dalam berinteraksi dengan kliennya harus mampu melihat dan memperlakukan kliennya sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensinya (Sudrajat, 2008)

2. Landasan Psikologis

Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan (peserta didik). Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh guru pembimbing adalah tentang: (a) motif dan motivasi; (b) pembawaan dan lingkungan, (c) perkembangan individu; (d) belajar; dan (e) kepribadian (Sudrajat, 2008).

3. Landasan Sosial-Budaya

Landasan sosial-budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada guru pembimbing tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial-budaya dimana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial-budaya yang ada di sekitarnya.

Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial-budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial-budaya yang melatarbelakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial-budaya ini tidak “dijembatani”, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya (Sudrajat, 2008).

Dalam proses konseling akan terjadi komunikasi interpersonal antara guru pembimbingan dengan peserta didik, yang mungkin antara guru pembimbing dan peserta didik memiliki latar sosial dan budaya yang berbeda. Ada lima macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi sosial dan penyesuaian diri antar budaya (Pederson dalam Prayitno (2003) yaitu: (a) perbedaan bahasa; (b) komunikasi non-verbal; (c) stereotipe; (d) kecenderungan menilai; dan (e) kecemasan. Kurangnya penguasaan bahasa yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa non-verbal pun sering kali memiliki makna yang berbeda-beda, dan bahkan mungkin bertolak belakang. Stereotipe cenderung menyamaratakan sifat-sifat individu atau golongan tertentu berdasarkan prasangka subjektif (*social prejudice*) yang biasanya tidak tepat.

Penilaian terhadap orang lain disamping dapat menghasilkan penilaian positif tetapi tidak sedikit pula menimbulkan reaksi-reaksi negatif. Kecemasan muncul ketika seorang individu memasuki lingkungan budaya lain yang unsur-unsurnya dirasakan asing.

Kecemasan yang berlebihan dalam kaitannya dengan suasana antar budaya dapat menuju ke culture shock, yang menyebabkan dia tidak tahu sama sekali apa, dimana dan kapan harus berbuat sesuatu. Agar komunikasi sosial antara konselor dengan klien dapat terjalin harmonis, maka kelima hambatan komunikasi tersebut perlu diantisipasi.

Terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, Moh. Surya (2006) mengetengahkan tentang *tren* bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan landasan semangat bhinneka tunggal ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik.

4. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode, seperti: pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

Sejak awal dicetuskannya gerakan bimbingan, layanan bimbingan dan konseling telah menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan dan pengolahan lingkungan secara ilmiah (McDaniel dalam Prayitno, 2003). Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang

bersifat “*multireferensial*”. Beberapa disiplin ilmu lain telah memberikan sumbangan bagi perkembangan teori dan praktek bimbingan dan konseling, seperti : psikologi, ilmu pendidikan, statistik, evaluasi, biologi, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, manajemen, ilmu hukum dan agama. Beberapa konsep dari disiplin ilmu tersebut telah diadopsi untuk kepentingan pengembangan bimbingan dan konseling, baik dalam pengembangan teori maupun prakteknya. Pengembangan teori dan pendekatan bimbingan dan konseling selain dihasilkan melalui pemikiran kritis para ahli, juga dihasilkan melalui berbagai bentuk penelitian (Sudrajat, 2008).

Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis komputer, sejak tahun 1980-an peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Gausel (Prayitno, 2003) bidang yang telah banyak memanfaatkan jasa komputer ialah bimbingan karier dan bimbingan dan konseling pendidikan. Moh. Surya (2006) mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer interaksi antara konselor dengan individu yang dilayaninya (peserta didik) tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual (maya) melalui internet, dalam bentuk “*cyber counseling*”. Dikemukakan pula, bahwa perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi menuntut kesiapan dan adaptasi konselor dalam penguasaan teknologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling.

Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor didalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan sebagaimana dikemukakan oleh McDaniel (Prayitno, 2003) bahwa konselor adalah seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu

mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian.

Berkenaan dengan layanan bimbingan dan konseling dalam konteks Indonesia, Prayitno memperluas landasan bimbingan dan konseling dengan menambahkan landasan paedagogis, landasan religius dan landasan yuridis-formal (Prayitno, 2003).

Landasan paedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari tiga segi, yaitu: (a) pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan; (b) pendidikan sebagai inti proses Bimbingan dan Konseling; dan (c) pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan Bimbingan dan Konseling.

Landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada tiga hal pokok, yaitu : (a) manusia sebagai makhluk Tuhan; (b) sikap yang mendorong perkembangan dari perikehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama; dan (c) upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya (termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi) serta kemasyarakatan yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah.

Ditegaskan pula bahwa salah satu *tren* bimbingan dan konseling saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual (Moh. Surya, 2006). Berangkat dari kehidupan modern dengan kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang serta kemajuan ekonomi yang dialami bangsa-bangsa Barat, ternyata telah menimbulkan berbagai

suasana kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan bathiniah dan berkembangnya rasa kehampaan. Dewasa ini sedang berkembang kecenderungan untuk menata kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kondisi ini telah mendorong kecenderungan berkembangnya bimbingan dan konseling yang berlandaskan spiritual atau religi.

Landasan yuridis-formal dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia berkaitan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku. Karena itu, konten dari layanan bimbingan dan konseling juga harus memperhatikan fungsi, prinsip, asas, dan tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai sebuah proses adalah bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Hanya manusia yang terbimblinglah yang akan dapat menjalani hidup ini dengan baik. Tanpa proses bimbingan yang berkelanjutan maka pada hakekatnya manusia itu sedang menuju kehancurannya sendiri. Dalam melakukan bimbingan tersebut seorang konselor harus mampu memahami dan menjalani proses itu dengan memperhatikan beberapa hal seperti fungsi, prinsip, asas dan tujuan dari bimbingan dan konseling.

B. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Dalam proses bimbingan dan konseling, ada beberapa fungsi yang dapat dipahami tentang bagaimana semestinya, antara lain:

1. *Fungsi Pemahaman*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu

mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.

2. *Fungsi Preventif*, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya : bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, *drop out*, dan pergaulan bebas (*free sex*).

3. *Fungsi Pengembangan*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel Sekolah lainnya secara sinergi sebagai *teamwork* berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (*brain storming*), *home room*, dan karyawisata.

4. *Fungsi Penyembuhan*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik

menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling, dan *remedial teaching*.

5. *Fungsi Penyaluran*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.

6. *Fungsi Adaptasi*, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala Sekolah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, guru pembimbing dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli.

7. *Fungsi Penyesuaian*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.

8. *Fungsi Perbaikan*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak). Guru pembimbing melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.

9. *Fungsi Fasilitasi*, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.

10. *Fungsi Pemeliharaan*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli (Sudrajat, 2008).

C. Prinsip Bimbingan dan Konseling

Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan, baik di Sekolah maupun di luar Sekolah. Prinsip-prinsip itu (Sudrajat, 2008) adalah:

1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli.

Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konseli atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah; baik pria maupun wanita; baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan lebih bersifat preventif dan pengembangan dari pada penyembuhan (kuratif); dan lebih diutamakan teknik kelompok dari pada perseorangan (individual).

2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Setiap konseli bersifat unik (berbeda satu sama lainnya), dan melalui

bimbingan, konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok.

3. *Bimbingan menekankan hal yang positif.* Dalam kenyataan masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan, karena bimbingan dipandang sebagai satu cara yang menekan aspirasi. Sangat berbeda dengan pandangan tersebut, bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan, dan peluang untuk berkembang.

4. *Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama.* Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab guru pembimbing, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mereka bekerja sebagai *teamwork*.

5. *Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling.* Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Kemampuan membuat pilihan secara tepat bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan.

Tujuan utama bimbingan adalah mengembangkan kemampuan konseli dalam memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan.

6. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

D. Asas-asas Bimbingan dan Konseling

Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut:

- 1. Asas Kerahasiaan,** yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaanya benar-benar terjamin.
- 2. Asas kesukarelaan,** yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli (konseli) mengikuti/menjalani pelayanan/kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut.
- 3. Asas keterbukaan,** yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di

dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik (konseli). Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran pelayanan/kegiatan. Agar konseli dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura.

5. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini guru pembimbing perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukan baginya.

6. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni: peserta didik (konseli) sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik (konseli).

7. Asas Kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik (konseli) dalam kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkenaan dengan “masa depan atau kondisi masa

lampau pun” dilihat dampak dan atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang.

8. Asas Kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan (peserta didik) yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.

9. Asas Keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbingan maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini kerja sama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

10. Asas Keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Bukanlah pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya tidak berdasarkan nilai dan norma yang dimaksudkan itu. Lebih jauh, pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan konseli (konseli) memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut.

11. Asas Keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling.

12. Asas Alih Tangan Kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (konseli) mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain; demikian pula guru pembimbing dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran (Sudrajat, 2008).

E. Tujuan Bimbingan Dan Konseling

Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling ialah agar konseli dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk: (1) mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, (2) mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya, (3) mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut, (4) memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, (5) menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerja dan masyarakat, (6) menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya; dan (7) mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal.

Secara khusus bimbingan dan konseling (Sudrajat, 2008) bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar (akademik), dan karir.

(1) Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi-sosial konseli adalah:

- > Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya.
- > Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing.
- > Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan (anugrah) dan yang tidak

menyenangkan (musibah), serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

- > Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun psikis.
 - > Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
 - > Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat
 - > Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya.
 - > Memiliki rasa tanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya.
 - > Memiliki kemampuan berinteraksi sosial, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia.
 - > Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun dengan orang lain.
 - > Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.
- (2) Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik (belajar) adalah :
- > Memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar, dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya.
 - > Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan.

- > Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat.
 - > Memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian.
 - > Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencananan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas.
 - > Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian.
- (3) Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir adalah :
- > Memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan.
 - > Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir.
 - > Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya, dan sesuai dengan norma agama.
 - > Memahami relevansi kompetensi belajar (kemampuan menguasai pelajaran) dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan.
 - > Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan (persyaratan) yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja.

- > Memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi.
- > Dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang konseli bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut.
- > Mengenal keterampilan, kemampuan dan minat. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya, dalam bidang pekerjaan apa dia mampu, dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut.
- > Memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

-----ooo0ooo-----

3 **Komponen Program Bimbingan Dan Konseling**

A. Konsep Program Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan di lembaga pendidikan formal terlaksana dengan mengadakan sejumlah kegiatan bimbingan. Seluruh kegiatan itu terselenggarakan dalam rangka suatu program bimbingan, yaitu suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Di dalam program bimbingan dan konseling terdapat beberapa komponen, yang meliputi susunan saluran formal untuk melayani para peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan yang lain, serta orang tua peserta didik.

Untuk menjangkau pelayanan bimbingan yang lebih luas dan mampu mencapai tujuan, program bimbingan dan konseling hendaknya disusun secara komprehensif. Gysberts & Henderson (2006) mengemukakan definisi program Bimbingan dan Konseling komprehensif sebagai berikut:

comprehensive guidance and counseling program as having a common language organizational framework with specific configuration of planned, sequenced, and coordinated guidance and counseling activities and service based on student, school, and community needs an resources, designed to serve all student and their parents or guardians in local school district.

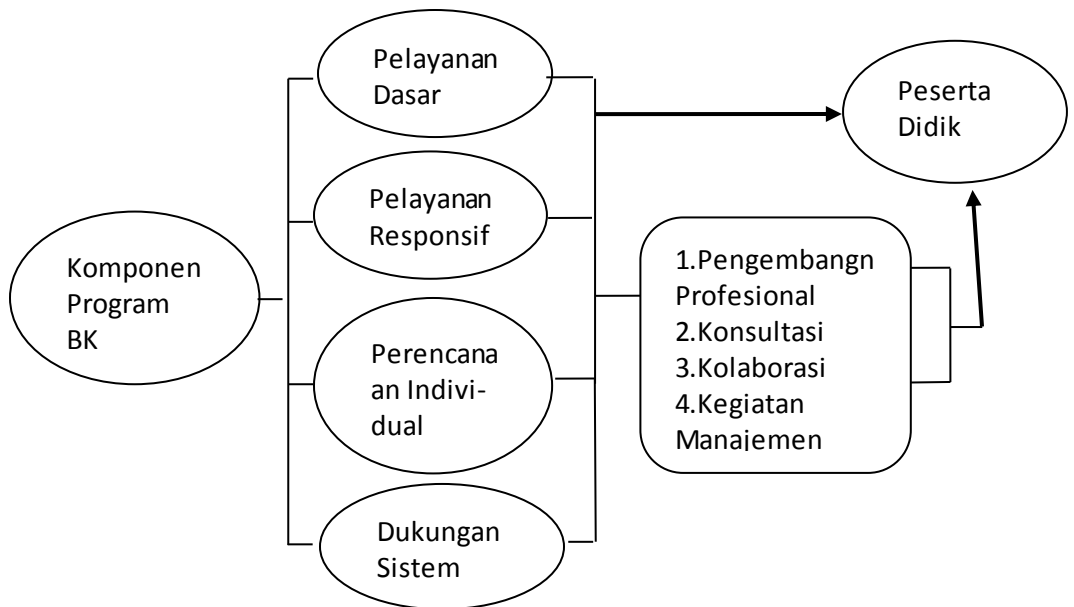
Berdasarkan definisi di atas terdapat empat konsep penting, yaitu: *Pertama*, program bimbingan dan konseling komprehensif merupakan arah kerja (*framework*) bimbingan dan konseling di sekolah. *Kedua*,

arah kerja (*framework*) tersebut berisi perencanaan, tahapan, rangkaian kegiatan dan pelayanan bimbingan dan konseling. *Ketiga*, kegiatan dan pelayanan bimbingan dan konseling dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, serta berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki. *Keempat*, sasaran program bimbingan dan konseling adalah peserta didik, dan orang tua.

Bimbingan dan konseling komprehensif sebagai sebuah model penyelenggaraan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah telah terbukti efektif. Gysbers, berdasarkan studi yang dilakukannya mengungkapkan bahwa program bimbingan dan konseling komprehensif memberikan kontribusi pada pencapaian prestasi akademik peserta didik (Brown & Trusty, 2005). Studi lain yang dilakukan oleh Yusuf, Ahman dan Juntika (Furqon dan Badrujaman, 2014) mengenai model program bimbingan dan konseling komprehensif di Bandung menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling komprehensif efektif diselenggarakan pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan.

B. Komponen Program Bimbingan dan Konseling.

Selanjutnya Gysbers dan Handerson (2006) mengemukakan terdapat empat komponen yang membentuk program bimbingan dan konseling komprehensif. Komponen tersebut meliputi: (1) pelayanan dasar, (2) perencanaan individual, (3) layanan responsif, dan (4) dukungan sistem. Keempat komponen program tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen Program Bimbingan dan Konseling (Depdiknas, 2007)

Dari gambar 3.1 Komponen Program Bimbingan dan Konseling di atas dijelaskan sebagai berikut ini :

(1) Pelayanan Dasar.

Pelayanan dasar adalah salah satu komponen program pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif, yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian) yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya.

Istilah pelayanan dasar ini lebih populer dengan sebutan kurikulum bimbingan (*guidance curriculum*). Tidak jauh berbeda dengan pelayanan dasar, Bowers & Hatch menyebutkan bahwa kurikulum bimbingan ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dalam diri peserta didik yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangannya (Fathur Rahman, t.t). Penggunaan instrumen asesmen perkembangan dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk mendukung implementasi komponen ini. Asesmen kebutuhan diperlukan untuk dijadikan landasan pengembangan pengalaman terstruktur yang disebutkan.

Pelayanan dasar bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar: (a) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama). (b) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. (c) mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (d) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya (Depdiknas, 2007)

Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas-

tugas perkembangannya (sebagai standar kompetensi kemandirian). Materi pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain mencakup pengembangan: (a) self-esteem, (b) motivasi berprestasi, (c) keterampilan pengambilan keputusan, (d) keterampilan pemecahan masalah, (e) keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, (f) kesadaran keragaman budaya, dan (g) perilaku bertanggung jawab. Hal-hal yang terkait dengan perkembangan karir mencakup pengembangan: (a) fungsi agama bagi kehidupan, (b) pemantapan pilihan program studi, (c) keterampilan kerja profesional, (d) kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmaniah-rohaniah) dalam menghadapi pekerjaan, (e) perkembangan dunia kerja, (f) iklim kehidupan dunia kerja, (g) cara melamar pekerjaan, (h) kasus-kasus kriminalitas, (i) bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan (j) dampak pergaulan bebas (Depdiknas, 2007). Layanan dasar bimbingan ini dapat berisi layanan bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan pribadi dan bimbingan karir. Keempat jenis layanan bimbingan tersebut adalah :

Pertama, layanan bimbingan belajar merupakan jenis bimbingan yang penting diberikan kepada peserta didik. Pengalaman menunjukkan kegagalan yang dialami peserta didik tidak semuanya disebabkan oleh rendahnya kemampuan. Tetapi kegagalan itu disebabkan karena mereka kurang memiliki keterampilan belajar dan kurang memperoleh pendidikan yang tepat.

Kedua, layanan bimbingan sosial perlu diberikan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan karena proses pendidikan di SMA merupakan usaha mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga terdidik dan profesional. Dalam proses pendidikan peserta didik dihadapkan pada

berbagai tuntutan. Tuntutan-tuntutan itu dapat menimbulkan masalah bagi peserta didik, baik masalah akademik maupun non akademik. Selain itu tuntutan lingkungan pergaulan peserta didik dapat juga menimbulkan masalah bagi dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik selalu berinteraksi dengan berbagai pihak, yaitu dengan teman sesama peserta didik, dengan guru dan staf/staf tu, dengan anggota keluarga, dan dengan sejawat. Bagi peserta didik yang memiliki ketrampilan sosial, dapat berinteraksi dengan baik dan memuaskan, tetapi bagi peserta didik yang kurang memiliki keterampilan sosial dapat menimbulkan masalah bagi diri maupun orang lain.

Ketiga, Layanan bimbingan pribadi sangat penting diberikan kepada peserta didik agar dapat menghadapi dan mengatasi konflik batinnya. Bimbingan pribadi, dapat berupa bimbingan untuk menjaga stabilitas emosional, mengarahkan diri, dan ketrampilan membina hubungan antar pribadi, serta teknik pemecahan masalah. Dengan bimbingan pribadi dan sosial peserta didik dapat mengembangkan pola interaksi yang harmonis dalam berbagai setting pergaulan dan mampu menyelesaikan masalahnya.

Keempat, layanan bimbingan karier kepada peserta didik merupakan usaha mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja melalui perencanaan dan pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, minat dan cita-citanya serta membekali ketrampilan yang relevan dengan pilihan kariernya. Bimbingan karier penting diberikan keadaan peserta didik agar dapat meninggalkan dunia pendidikan dengan optimisme yang tinggi dan perasaan yang aman. Layanan bimbingan

dan konseling di sekolah hendaknya ditekankan pada bimbingan belajar dan bimbingan karier.

Penelitian oleh Morris (Mittendorff, et.al., 2012) menunjukkan bahwa siswa dengan eksplorasi karir tinggi keterampilan lebih mungkin untuk membuat transisi dalam pasar tenaga kerja yang ditunjukkan perkembangan dari siswa dengan kemampuan eksplorasi karir yang lebih rendah. Mittendorff menyebutkan bahwa wawancara karir antara guru dan siswa tampaknya menjadi penting, karena bimbingan individu selama percakapan ini membantu siswa untuk aktif merefleksikan proses pembelajaran mereka sendiri atau untuk membangun makna tentang diri mereka sendiri dan karir masa depan mereka (Mittendorff, et.al., 2012).

Dengan demikian layanan bimbingan karier bagi peserta didik sangat diperlukan hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak peserta didik yang mengalami kesulitan mengambil keputusan karier akibat perkembangan teknologi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia sehingga untuk memasuki lapangan kerja dibutuhkan tingkat profesional yang tinggi dan kompetisi yang ketat.

Layanan-layanan tersebut di atas ditujukan kepada seluruh peserta didik, dan dapat menggunakan strategi klasikal dan dinamika kelompok atau bimbingan kelompok. Sedangkan strategi pelaksanaan pelayanan dasar Fathur Rahman, (tanta tahun) dapat berupa:

- (1) Bimbingan kelas; Program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau *brain storming* (curah pendapat).

- (2) Pelayanan orientasi; Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Pelayanan orientasi ini biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru. Materi pelayanan orientasi di sekolah biasanya mencakup organisasi sekolah, staf dan guru-guru, kurikulum, program bimbingan dan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana, dan tata tertib sekolah.
- (3) Pelayanan Informasi; Pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. melalui komunikasi langsung, maupun tidak langsung (melalui media cetak maupun elektronik, seperti: buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet).
- (4) Bimbingan kelompok; Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil (5 s.d. 10 orang). Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini, adalah masalah yang bersifat umum dan tidak rahasia, seperti: cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, dan mengelola stress.
- (5) Pelayanan Pengumpulan Data (Aplikasi Instrumentasi); merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik, dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.

(2) Pelayanan Responsif

Layanan responsif ialah layanan bimbingan dan konseling yang bersifat responsif, yaitu membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan pelayanan ini adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan ini juga sebagai upaya mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, baik yang berkenaan dengan masalah sosial-pribadi, karier, dan atau masalah pengembangan pendidikan. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi (Nurihsan, 2012). Ketiga jenis layanan tersebut yaitu:

Pertama, konseling individual merupakan layanan khusus dalam bentuk hubungan langsung tatap muka antara konselor dan konseli. Konseling individual mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya (Willis, 2004).

Tujuan konseling individual adalah mengupayakan pemecahan masalah konseli dengan kekuatan konseli sendiri. Konseling dipandang sebagai layanan yang paling utama dalam kegiatan bimbingan bahkan dapat dikatakan bahwa konseling merupakan jantung hati pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh.

Pelaksanaan layanan konseling di SMA, hendaknya ditekankan pada konseling pendidikan, perencanaan dan penetapan karier peserta didik, seperti pemilihan jurusan, metode belajar yang efektif dan efisien, bantuan remedial dalam bentuk konseling pendidikan, pengembangan aktivitas untuk perencanaan dan pengembangan karier.

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan konseling, konselor diharapkan mampu bekerjasama dengan profesi bantuan lain seperti psikiater, dan psikolog dalam meningkatkan kesehatan mental dan fisik para peserta didik melalui konseling klinik. Untuk dapat melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Konseling tersebut, konselor sebaiknya mempelajari, menerapkan dan berpengalaman luas dalam layanan konseling dengan segenap seluk beluknya. Hal ini berarti bahwa konselor dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalitasnya agar wawasan dan ketrampilan mereka sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

Selain konseling individual, konseling kelompok juga perlu dilaksanakan di SMA agar pelayanan bimbingan dapat menjangkau populasi peserta didik yang banyak. Konseling kelompok merupakan upaya untuk membantu individu agar dapat menjalani perkembangannya dengan lebih lancar, upaya itu bersifat preventif, kuratif, dan promotif. Dengan kata lain konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu (konseli) yang dilakukan dalam suasana kelompok, bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai spek perkembangan dan pertumbuhannya (Rusmana, 2009). Fungsi-fungsi terapi itu diciptakan dan dikembangkan dalam kelompok kecil melalui saling memperdulikan antara sesama anggota

kelompok dan anggota kelompok dengan konselor. Konseling kelompok, juga berorientasi pada perkembangan individu dan berusaha untuk menemukan kekuatan-kekuatan yang bersumber pada diri sendiri. Klien-klien konseling kelompok mungkin mengalami krisis dan konflik-konflik yang bersifat temporer dan berusaha untuk merubah perilaku menyalahkan diri (Rusmana, 2009).

Tujuan utama konseling kelompok adalah mengembangkan hubungan relationship peserta didik, membantu pencarian identitas, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memeriksa atau menguji perasaan dan sikapnya bersama anggota kelompok lainnya, membantu peserta didik belajar lebih banyak dalam suasana alamiah, mengurangi sikap defensif, terbuka kesempatan mengungkapkan perasaan, serta meningkatkan kemampuan untuk santai (Prayitno dan Amti, 2014). Konseling kelompok lebih mengutamakan pada pengembangan pribadi yang disediakan bagi individu yang mempunyai masalah terutama yang berkaitan dengan masalah kesulitan melakukan hubungan interpersonal atau masalah sosial lainnya.

Konseli dapat belajar tentang dirinya dalam hubungannya dengan orang lain serta dapat belajar untuk memecahkan masalah berdasarkan masukan dari anggota lainnya. Kelebihan dari konseling kelompok bukan saja dalam aspek efisiensi, tetapi juga mempunyai daya tarik akibat adanya dinamika perubahan yang terjadi dalam kelompok ketika layanan itu terjadi. Interaksi antar individu dalam kelompok merupakan sesuatu yang unik dan tidak dijumpai dalam konseling individual.

Larrabee & Terres (1984) meramalkan bahwa pada tahun 2004 layanan konseling kelompok mendominasi segenap upaya pelayanan bimbingan konseling. Pada waktu itu dunia dan masyarakat sudah

sangat terbuka, lembaga-lembaga kemasyarakatan, sekolah dan keluarga juga sangat terbuka, arus informasi dan mobilitas penduduk semakin deras, segala macam kebutuhan semakin meningkat baik jenis maupun intensitasnya. Penelitian Danino dan Shechtman (2012) menyebutkan bahwa konseling kelompok lebih efektif membina individu dalam mengurangi stres daripada pertimbangan orang tua memilih pengobatan praktis mengingat lebih efektif. Selain itu, konseling kelompok muncul lebih efektif dalam hal efektivitas biaya.

Kedua, layanan konsultasi merupakan salah satu diantara misi yang diemban oleh pusat layanan Bimbingan dan Konseling di SMA. Pada umumnya, konsultasi dalam rangka program bimbingan adalah proses pemberian asistensi profesional kepada guru, orang tua, pejabat struktural, dan konselor lain, dengan tujuan mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menimbulkan hambatan-hambatan dalam komunikasi mereka dengan para siswa atau mengurangi keberhasilan program pendidikan sekolah (Shertzer dan Stone, 1981). Konsultasi diakui sebagai bentuk layanan bimbingan yang khusus, karena disadari bahwa pelayanan langsung kepada peserta didik dalam keadaan tertentu tidak selamanya membawa hasil yang diharapkan.

Konsultasi ialah proses interaksi antara dua pribadi yaitu konsultasi yang profesional dan konsultasi yang minta bantuan konsultasi untuk memperoleh pemecahan dalam masalah kerja yang menemui beberapa kesulitan, dan daerah spesialisasi yang berwenang terhadap masalah kerja yang menemui beberapa kesulitan dan daerah spesialisasi yang berwenang terhadap masalah yang dihadapi sekarang.

Selanjutnya Caplan mengemukakan dua kategori pokok model konsultasi. Pertama, konsultasi kasus yaitu konsultasi mengassessment,

mendiskusikan, dan memberikan saran tentang kasus tertentu. Kedua, konsultasi administrasi yaitu bertujuan untuk menguji aplikasi dan rekomendasi yang telah dibuat untuk melihat perubahan yang bermanfaat bagi fungsi organisasi (Shertzer dan Stone, 1981).

Fullmer dan Bernard (Shertzer dan Stone, 1981) merumuskan secara singkat delapan tujuan konsultasi yaitu (a) untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi peserta didik, orang tua dan administrator sekolah, (b) menyempurnakan komunikasi dan mengembangkan informasi diantara orang yang penting, (c) mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi yang bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar, (d) memperluas layanan pendidikan bagi guru dan administrator, (e) membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku, dan (g) menggerakkan organisasi mandiri.

Ketiga, referral merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam konseling. Referral adalah tindakan mengalihkan individu kepada orang lain atau agen di dalam atau di luar sekolah. Mereka diperlukan karena karena dapat memberikan bantuan khusus yang tidak dapat diperoleh di sekolah atau dari konselor.

Di luar lembaga pendidikan, terdapat beberapa sumber referral yang dapat membantu konselor menangani kasus konseli tertentu. Sumber-sumber referral itu seperti lembaga-lembaga kesehatan mental, balai latihan kerja, pusat-pusat penempatan kerja, pusat rehabilitasi sosial, kelompok keagamaan, organisasi kepemudaan, pelayanan kesehatan dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu konselor diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber referral.

Untuk memperoleh hasil referal yang efektif, perlu kecermatan menentukan kebutuhan dan jenis layanan yang diperlukan, pemahaman mengenai ahli yang dapat dijadikan sumber referal, keterampilan membantu peserta didik dan keluarganya untuk menjadikan layanan refera menjadi bermanfaat (Shertzer dan Stone, 1981). Ada empat praktik dalam kegiatan referal yang hendaknya tidak dilakukan oleh konselor, yaitu (a) konseli tidak diberi alternatif pilihan kepada ahli siapa yang akan direferal, (b) konselor mereferal konseli kepada pihak yang kemampuannya diragukan, (c) konselor membicarakan masalah konseli kepada calon ahli yang menerima referal tanpa persetujuan konseli, dan (d) konselor menyebutkan nama konseli kepada calon ahli tempat referal. Butir-butir tersebut, mengisyaratkan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan oleh konselor dan hal-hal apa yang sebaiknya konselor lakukan dalam melakukan referal. Hal ini penting karena konselor merupakan jabatan profesional yang menuntut ketelitian dan kecermatan dalam melakukan layanan serta menjunjung kode etik profesi.

(3) Perencanaan individual

Perencanaan individual ialah program Bimbingan dan Konseling untuk membantu peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia dilingkungannya. Perencanaan individual bertujuan untuk membantu konseli agar : (a) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, (b) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial,

belajar maupun karier, (c) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya (Depdiknas, 2007). Kegiatan ini difokuskan untuk membantu peserta didik mengembangkan, menganalisis, dan mengevaluasi rencana dan tujuan-tujuan pendidikan, pekerjaan dan pribadi. Ada tiga jenis bimbingan untuk membantu perencanaan individual peserta didik, yaitu pengumpulan data peserta didik, bantuan individual dan penempatan. Ketiga jenis bimbingan tersebut diuraikan sebagai berikut

Pertama, layanan pengumpulan data ialah serangkaian kegiatan mengumpulkan data pribadi peserta didik yang relevan. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas, lengkap dan mendalam tentang peserta didik. Dapat membantu mendapatkan pemahaman terhadap bakat, kecerdasan, dan kemampuan dalam bidang pendidikan, pribadi sosial dan pilihan karier. Data peserta didik yang dikumpulkan mencakup aspek psikologis, sifat-sifat pribadi dan data sosial.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan alat tes dan non tes. Alat tes berupa tes bakat, tes minat, tes inteligensi, dan tes hasil belajar, sedangkan alat non tes berupa angket, wawancara, otobiografi, anekdota, skala penilaian, dan sosiometri. Konselor terlatih dapat mengadministrasi dan menginterpretasi data psikologis peserta didik, kemudian mengkomunikasikan kepada peserta didik yang bersangkutan atau pihak lain yang memerlukan untuk kepentingan pendidikan dan bimbingan.

Kedua, bantuan individual adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk membantu peserta didik menggunakan secara berkelanjutan informasi hasil penilaian diri (*appraisal*) untuk

perencanaan dan aktualisasi pribadi-sosial, pendidikan, karier, dan perkembangan bursa kerja dengan melibatkan peserta didik, dan orang tua peserta didik. *Ketiga*, penempatan merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang membantu individu memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan cita-citanya. Kegiatan penempatan dapat dilakukan pada saat peserta didik masih dalam studi maupun setelah menyelesaikan studi. Salah satu layanan penempatan yaitu membantu peserta didik dalam proses transisi atau peralihan dari SMA ke SMA atau ketika ingin memasuki dunia kerja dengan memberi pendidikan ketrampilan atau pelatihan penunjang karier (Gysbers dan Henderson, 2006).

Dengan demikian, melalui pelayanan perencanaan individual, konseli diharapkan dapat: (a) mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karier, dan mengembangkan kemampuan sosial-pribadi, yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang pendidikan, dunia kerja, dan masyarakatnya, (b) menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya, (c) mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya, (d) mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya (Depdiknas, 2007).

(4) Dukungan Sistem

Dukungan sistem merupakan komponen program bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan program bimbingan dan keefektifan program pendidikan. Dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya teknologi informasi dan komunikasi), dan mengembangkan kemampuan profesional konselor

secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Sedangkan Gysbers dan Handerson (2006) menyebutkan bahwa dukungan sistem, ditekankan pada kerjasama antara program bimbingan dengan program pendidikan lain yang ada di SMA untuk mencapai tujuan program bimbingan dan pendidikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dukungan sistem membantu staf/personil bimbingan dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, responsif, dan perencanaan individual.

Dari pendapat di atas, dukungan sistem dapat digambarkan dua hal. *Pertama*, mendukung ketiga komponen program Bimbingan dan Konseling. *Kedua*, program yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kelompok-kelompok bidang tertentu dari keseluruhan program pendidikan.

C. Sasaran Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling.

Secara umum sasaran dari program Bimbingan dan Konseling di sekolah adalah mengembangkan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu yang secara optimal agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Hamrin dan Erickson menyebutkan bahwa bimbingan sebagai aspek program pendidikan yang bersangkutan terutama untuk membantu siswa yang disesuaikan dengan situasinya sekarang dan untuk merencanakan masa depannya yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sosialnya (Dogar, et.al. 2011). Lebih khusus lagi sasaran pembinaan pribadi peserta didik melalui pelayanan Bimbingan dan Konseling melalui tahap-tahap pengembangan

kemampuan-kemampuan (1) pengungkapan, pengenalan dan penerimaan diri, (2) pengungkapan, pengenalan dan penerimaan lingkungan, (3) pengambilan keputusan, (4) pengarahan diri, dan (5) perwujudan diri (Fathurrohman, 2014). Tahapan-tahapan tersebut masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri.

Berkenaan dengan pengungkapan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa harus diungkap? apa yang mesti diungkap? siapa yang diungkap? dan bagaimana cara mengungkapnya? Tiap individu (siswa) diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dibekali dengan potensi-potensi tertentu, namun tidak semua individu mampu mengungkap potensi dirinya. Dalam kondisi demikian, individu harus dibantu untuk mengungkap potensi-potensi dirinya. Demikian juga setiap individu (siswa) pasti memiliki masalah, tetapi kompleksitasnya berbeda satu dengan yang lain. Tidak semua individu mengenal atau mengetahui masalah dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Selanjutnya, yang mesti diungkap dari individu adalah potensi-potensi diri dan masalah yang dihadapinya, sedangkan yang diungkap adalah semua siswa yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Cara mengungkap potensi-potensi dan masalah individu bisa dilakukan melalui konseling atau cara yang lainnya seperti tes, observasi, angket, wawancara, sosiometri, catatan pribadi, kunjungan rumah, dan lain-lain.

Pribadi dewasa yang mantap dan berkembang secara baik adalah apabila individu yang bersangkutan benar-benar menyadari atau memahami tentang dirinya. Kesadaran tentang diri sendiri akan tercapai apabila kemampuan pengungkapan diri dapat berkembang secara baik

pula. Tidak semua individu (siswa) mampu mengungkap potensi dirinya seperti kecakapan, kemampuan, bakat, dan potensi-potensi lainnya. Demikian juga tidak semua individu mampu mengungkap berbagai persoalan yang dihadapinya. Kemampuan pengungkapan diri tidak serta merta timbul pada diri seseorang, melainkan memerlukan bantuan orang lain atau alat-alat tertentu seperti melalui tes intelegensi, tes bakat, minat, alat pengungkapan ciri-ciri kepribadian, dan lain sebagainya, dengan perkataan lain melalui pelayanan Bimbingan dan Konseling.

(2) Pengenalan lingkungan.

Individu (siswa) hidup di tengah-tengah lingkungan. Individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal lingkungan. Lingkungan yang kurang menguntungkan bagi individu, hendaknya tidak membuat ia putus asa, melainkan ia terima secara wajar dan berusaha memperbaikinya. Agar dapat mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya atau agar individu berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungannya, individu yang bersangkutan harus diperkenalkan dengan lingkungannya. Individu (siswa) yang tidak mengenal lingkungan sekolahnya secara baik, maka perilakunya akan bermasalah seperti pelanggaran disiplin. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga terwujud pribadi yang sehat, dalam arti pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.

(3) Pengambilan keputusan.

Setelah potensi individu (siswa) terungkap dan individu yang bersangkutan mengenal potensi dirinya, mengenal masalah-masalah

yang dihadapinya dan individu tersebut dapat menerima dirinya apa adanya sesuai dengan potensinya, serta telah mengenal lingkungannya secara baik (mampu mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya), maka tahap berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri, seringkali berat dilakukan, terlebih apabila terjadi pertentangan antara realitas tentang diri sendiri dengan lingkungannya. Di sinilah peranan bimbingan dan konseling untuk membantu penampilan secara objektif dua unsur, yaitu diri sendiri dan lingkungan.

(4) Pengarahan diri.

Kemampuan mengambil keputusan hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. Sebaik apapun sebuah keputusan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata tidak akan ada manfaatnya. Seseorang (individu) harus berani menjalani keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri. Seorang siswa telah memutuskan bahwa ia harus menjumpai atau menghadap wali kelas untuk membicarakan rencana kegiatan liburan akhir semester, maka ia harus berani melaksanakan keputusan itu, yaitu menghadap wali kelas. Seorang siswa telah memutuskan bahwa ia harus membuat jadwal belajar dan melaksanakannya secara konsisten untuk meningkatkan prestasi belajarnya, maka ia harus berani dan konsekuen melaksanakan keputusan yang telah diambilnya, yaitu membuat jadwal belajar, dan melaksanakannya.

(5) Eksistensi diri (perwujudan diri).

Dalam konteks ini tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu individu (siswa) agar mampu mewujudkan diri secara baik

di tengah-tengah lingkungannya. Setiap individu hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dasar, dan karakteristik kepribadiannya.

Perwujudan diri individu hendaknya dilakukan tanpa paksaan dan tanpa ketergantungan kepada orang lain. Selain itu, perwujudan diri hendaknya normatif dalam arti sesuai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Apabila kemampuan mewujudkan diri benar-benar telah dimiliki seseorang, maka ia akan mampu berdiri sendiri dengan pribadi yang bebas dan mantap.

Oleh karena itu jika ingin melaksanakan evaluasi hasil dari pelayanan Bimbingan dan Konseling, yang menjadi sasaran evaluasi adalah berorientasi pada perubahan tingkah laku (termasuk di dalamnya pendapat, nilai dan sikap serta perkembangan siswa) (Daniaty, 2012). Oleh karena itu berdasarkan pendapat tersebut maka evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling tidak dapat diberlakukan melalui ulangan, hasil tes atau ujian, pemeriksaan hasil pekerjaan rumah, melainkan diberlakukan dalam proses pencapaian kemajuan dari perkembangan perubahan tingkah laku siswa atau klien itu sendiri secara positif setelah memperoleh atau menjalani layanan yang telah diberikan kepadanya.

-----ooo0ooo-----

4 Pelayan**an** Bimbingan Dan Konseling

A. Pengertian Layanan Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling merupakan sebuah pelayanan pemberian bantuan kepada para siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara individual maupun kelompok dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier dengan melalui berbagai jenis layanan yang diberikan disertai kegiatan pendukung, sehingga siswa benar-benar mampu dapat berkembang secara optimal dan mandiri, berdasarkan tatanan nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

Para ahli telah banyak memberikan definisi dari layanan bimbingan dan konseling dengan cara berbagai variasi, namun kesemuanya itu merujuk kepada hakikat, prinsip, tujuan dan fungsi serta prosedur dari bimbingan dan konseling itu sendiri.

Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Dengan adanya bimbingan dan konseling diharapkan dapat memberikan solusi bagi siswa atau peserta didik di sekolah. Agar peserta didik menjadi lebih baik dari segi prilakunya. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal, sesuai dengan potensinya.

Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga efektif dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, maka menjadi tanggung jawab bersama antara personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan pengawas. (<https://fitriariastuti.weebly.com/layanan-layanan-bimbinga-konseling.html>).

B. Jenis-Jenis Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Jenis-jenis layanan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari konsep bimbingan dan konseling dalam rangka memenuhi berbagai azas, prinsip, fungsi dan tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional saat ini terdapat tujuh jenis layanan. Namun sangat mungkin ke depannya akan semakin berkembang, baik dalam jenis layanan maupun kegiatan pendukung. Para ahli bimbingan di Indonesia saat ini sudah mulai meluncurkan dua jenis layanan baru yaitu layanan konsultasi dan layanan mediasi. Namun, kedua jenis layanan ini belum dijadikan sebagai kebijakan formal dalam sistem pendidikan di sekolah. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini diuraikan ketujuh jenis layanan bimbingan dan konseling yang saat ini diterapkan dalam pendidikan nasional.

Dalam menjalani proses bimbingan dan konseling beberapa hal yang perlu ditekankan yaitu berupa: pengenalan, pemahaman, peneraman, pengarahan, dan penyesuaian diri agar dalam prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Bentuk oprasional dari layanan bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan menurut Sudrajat (2008), Sukardi (2008), Tohirin (2012), Prayitno dan Amti (2015), dan Ahmad (2016) adalah sebagai berikut:

1. Layanan Orientasi

Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu, sekurang-kurangnya diberikan dua kali dalam setahun yaitu pada setiap awal semester.

Layanan orientasi berupaya menjembatani kesenjangan antara seseorang dengan suasana ataupun objek-objek baru. Layanan ini juga secara langsung ataupun tidak langsung mengantarkan orang yang dapat memasuki suasana ataupun objek baru agar ia dapat mengambil manfaat berkenaan dengan situasi atau objek baru itu. Konselor bertindak sebagai pembangun jembatan atau agen yang aktif mengantarkan seseorang memasuki daerah baru.

Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Materi kegiatan layanan orientasi menyangkut:

- a. Pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah
- b. Peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa.
- c. Organisasi dan wadah-wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa.
- d. Kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya.
- e. Peranan kegiatan bimbingan karir.
- f. Peranan pelayanan bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan siswa,

2. Layanan Informasi.

Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi (seperti: informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karier, pendidikan lanjutan). Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu, dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karier berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Layanan informasi pun berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Materi layanan informasi menyangkut:

- a. Tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi.
- b. Usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyuluhan dan pengembangan.
- c. Tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun.
- d. Nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan upaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat.
- e. Mata pelajaran dan pembedangannya seperti program inti dan program tambahan.
- f. Sistem penjurusan, kenaikan kelas, syarat-syarat mengikuti UN, dll.
- g. Fasilitas penunjang/sumber belajar.

3. Layanan Pembelajaran.

Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek

tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan pembelajaran berfungsi untuk pengembangan.

4. Layanan Penempatan dan Penyaluran.

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program pelatihan, magang, kegiatan ko/ekstra kurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat dan segenap potensi lainnya.

Layanan penempatan dan penyaluran berfungsi untuk pengembangan. Materi kegiatan layanan penempatan dan penyaluran meliputi:

- a. Penempatan kelas siswa, program study/jurusan dan pilihan ekstrakurikuler yang dapat menunjang pengembangan sikap, kebiasaan, kemampuan, bakat dan minat.
- b. Membantu dalam kegiatan program khusus sesuai dengan kebutuhan siswa, baik pengajaran maupun program pengayaan dan seleksi masuk perguruan tinggi.
- c. Penempatan dan penyaluran dalam kelompok sebaya, kelompok belajar dan organisasi kesiswaan serta kegiatan sosial sekolah.

5. Layanan Penguasaan Konten.

Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkembangan dan kehidupannya setiap individu

perlu menguasai berbagai kemampuan ataupun kompetensi. Dengan kemampuan ataupun kompetensi itulah individu itu hidup dan berkembang. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada individu (sendiri-sendiri ataupun kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar.

Tohirin (2007) menyebutkan bahwa layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu (siswa) baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan penguasaan konten merupakan layanan dalam Bimbingan dan Konseling yang bertujuan individu dalam menguasai aspek-aspek konten tertentu secara tersinergikan.

Prayitno (2004: 2) menjelaskan pengertian penguasaan konten lebih lanjut: Layanan penguasaan konten (PKO) merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten yang didalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan yang terkait didalamnya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dengan layanan penguasaan konten, diharapkan individu mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Dan melalui layanan penguasaan konten juga mampu membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dalam Bimbingan dan Konseling layanan penguasaan konten dilaksanakan oleh orang yang

berkompeten dibidangnya misalnya guru pembimbing. Pelaksanaan layanan tersebut dapat disertai dengan teknik atau teknik yang mendukung seperti diskusi kelompok, penugasan dan latihan terbatas, survei lapangan; study kepustakaan, percobaan (termasuk kegiatan laboratorium, bengkel, studio), dan latihan tindakan (dalam rangka perubahan tingkah laku).

Dalam beberapa kasus, teknik layanan penguasaan konten yang dapat diberikan yaitu bermain peran. Penerapkan teknik bermain peran ini untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mampu meningkatkan motivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Salah satu teknik yang menunjang keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar adalah dengan bermain peran. Alasan digunakannya layanan penguasaan konten ini karena sesuai dengan tujuan dari layanan penguasaan konten itu sendiri yaitu tujuan umum agar terkuasainya konten atau kompetensi tertentu serta menambah pemahaman, mengarahkan sikap dan kebiasaan tertentu, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya, serta tujuan khusus memahami konten/kompetensi yang diperlukan, konten yang dipelajari akan mengarahkan individu kepada terhindarnya dari masalah, penguasaan konten diarahkan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami, mengembangkan individu dan memelihara potensi yang dimilikinya, Individu dapat membela diri terhadap ancaman atau pelanggaran terhadap hak-haknya (Prayitno, 2004: 3-4).

6. Layanan Konseling Perorangan.

Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing untuk membahas dan

mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling perorangan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi.

Pelaksanaan usaha dan pengentasan siswa dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pengenalan dan pemahaman permasalahan.
- b. Analisis yang tepat.
- c. Aplikasi dan pemecahan permasalahan.
- d. Evaluasi, baik evaluasi awal, proses ataupun evaluasi akhir.
- e. Tindak lanjut.

Melihat kepada teknik penyelenggaraan konseling perorangan terdapat bermacam-macam teknik konseling perorangan yang sangat ditentukan oleh permasalahan yang dialami oleh siswa. Teknik konseling perorangan yang sederhana melalui proses/tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pembukaan
- b. Tahap penjelasan (eksplorasi)
- c. Tahap perubahan tingkah laku
- d. Tahap penilaian/tindak lanjut.

Materi layanan konseling perorangan meliputi:

- a. Pemahaman sikap, kebiasaan, kekuatan diri dan kelemahan, bakat, minat dan penyalurannya.
- b. Pengentasan kelemahan diri dan pengembangan kekuatan diri.
- c. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima dan menyampaikan pendapat, bertingkah laku sosial, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat.

d. Mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik, disiplin dan berlatih dan pengenalan belajar sesuai dengan kemampuan, kebiasaan dan potensi diri.

7. Layanan Bimbingan Kelompok.

Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan (topik) tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir/jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan.

8. Layanan Konseling Kelompok.

Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik (masing-masing anggota kelompok) memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan dan advokasi.

9. Layanan Konsultasi.

Layanan Konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Pengertian konsultasi dalam program BK adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi

dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain.

10. Layanan Mediasi.

Istilah “mediasi” terkait dengan istilah “media” yang berasal dari kata “medium” yang berarti perantara. Dalam literatur Islam istilah “mediasi” sama dengan “wasilah” yang juga berarti perantara. Berdasarkan arti di atas, mediasi bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengantarai atau menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah. Juga bermakna menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda dan mengadakan kontak sehingga dua pihak yang semula terpisah menjadi saling terkait. Melalui mediasi atau wasilah dua pihak yang sebelumnya terpisah menjadi saling terkait, saling mengurangi atau meniadakan jarak, saling memperkecil perbedaan sehingga jarak keduanya menjadi lebih dekat. Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.

Sedangkan fokus dari layanan mediasi adalah perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Secara umum tujuan dari layanan mediasi adalah agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Secara Khusus Layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negative (bertikai atau bermusuhan) menjadi kondisi baru (kondusif

dan bersahabat) dalam hubungan antara dua belah pihak yang bermasalah. Terjadinya perubahan kondisi awal yang cenderung negatif kepada kondisi yang lebih positif.

Bila dilihat dari proses layanan mediasi itu sendiri melibatkan konselor dan klien (siswa), yaitu dua pihak (atau lebih) yang sedang mengalami masalah berupa ketidakcocokan diantara mereka. Dimana masing-masing pihak:

(1) Konselor.

Konselor sebagai perencana dan penyelenggara layanan MED mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan diantara pihak-pihak yang bertikai. Konselor membangun jembatan diatas jurang yang menganga diantara dua pihak (atau lebih) yang sedang bermasalah itu.

(2) Klien (Siswa).

Berbeda dari layanan onseling perorangan, pada layanan mediasi konselor menghadapi klien yang terdiri dari dua pihak atau lebih, dua orang individu atau lebih, dua kelompok atau lebih, atau kombinasi sejumlah individu dan kelompok

(3) Masalah klien.

Masalah klien yang dibahas dalam layanan mediasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi diantara individu dan atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai, yang sekarang meminta bantuan konselor untuk mengatasinya. Masalah-masalah tersebut dapat berpangkal pada pertikaian atas kepemilikan sesuatu, kejadian dadakan seperti perkelahian, persaingan perebutan sesuatu., perasaan tersinggung, dendam dan sakit hati., tuntutan atas hak, dsb. Pokok pangkal permasalahan tersebut menjadikan kedua belah pihak (atau lebih) menjadi tidak harmonis atau bahkan saling antagonistic yang

selanjutnya dapat menimbulkan suasana eksplosif yang dapat membawa malapetaka atau bahkan korban.

Dengan demikian layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator.

Sedangkan Djumhur dan Surya (2008) menyebutkan bahwa pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh bimbingan di sekolah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengumpulan Data tentang Murid
2. Pelayanan Pemberian Penerangan
3. Pelayanan Penempatan
4. Pelayanan Pengajaran
5. Pelayanan penyuluhan
6. Pelayanan Penelitian dan Penilaian (evaluasi)
7. Pelayanan Hubungan Masyarakat.

Secara singkat jenis pelayanan Bimbingan dan Konseling tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengumpulan Data tentang Murid

Sesuai dengan pengertian bahwa bimbingan adalah bantuan bagi individu yang menghadapi masalah, maka sudah tentu berhasil tidaknya suatu usaha bantuan dalam rangka bimbingan akan banyak bergantung dari keterangan-keterangan atau informasi-informasi tentang individu tersebut. Oleh karena itu mengumpulkan data seperti ini merupakan langkah pertama dalam kegiatan bimbingan secara keseluruhan.

2. Pelayanan Pemberian Penerangan

Yang dimaksud dengan pelayanan ini adalah memberikan penerangan-penerangan yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapny mengenai berbagai hal yang diperlukan oleh setiap murid, baik tentang pendidikan, pekerjaan, sosial, maupun pribadi.

3. Pelayanan Penempatan

Hakekat dari pelayanan penempatan ini adalah membantu individu memperoleh penyesuaian diri dengan jalan menempatkan dirinya pada posisi yang sesuai. Yang menjadi tujuan pelayanan penempatan ini adalah agar setiap individu dapat posisi yang sesuai keadaan dirinya, seperti minat, kecakapan, bakat, cita-cita, tingkat perkembangan dan sebagainya.

4. Pelayanan Pengajaran

Yang dimaksud dengan pelayanan pengajaran adalah kegiatan pemberian bantuan kepada murid-murid dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pengajaran. Yang menjadi tujuannya adalah agar setiap murid memperoleh penyesuaian diri yang baik serta mengembangkan kemampuannya secara optimal dalam kegiatan pengajaran.

5. Pelayanan penyuluhan

Penyuluhan merupakan inti kegiatan program bimbingan. Kegiatan penyuluhan ini di samping berfungsi sebagai terapi (penyembuh), dapat pula berfungsi sebagai cara pengumpulan data. Penyuluhan merupakan kegiatan profesional, artinya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan keahlian serta pengalaman khusus dalam bidang penyuluhan.

6. Pelayanan Penelitian dan Penilaian (evaluasi)

Tujuan pelayanan ini adalah untuk mengadakan penelitian dan penilaian mengenai masalah yang berhubungan dengan kegiatan program bimbingan dan penyuluhan. Program bimbingan yang baik senantiasa mendasarkan diri kepada hasil-hasil penelitian dan penilaian.

7. Pelayanan Hubungan Masyarakat.

Di samping memberikan pelayanan kepada murid-murid dan personil sekolah lainnya, kegiatan bimbingan memberikan pelayanan pula kepada pihak-pihak luar sekolah, yaitu masyarakat. Tujuan pelayanan ini adalah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah murid-murid, seperti kenakalan anak, pembolosan, kelesuan belajar, drop-out dan sebagainya.

B. Prinsip-Prinsip Pokok Pelayanan Bimbingan dan Konseling.

Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah perlu diperhatikan prinsip-prinsip pokok yang akan mendasari program yang akan disusun. Prinsip-prinsip pelaksanaan program layanan Bimbingan dan Konseling tersebut merupakan perpaduan hasil kajian teoritik dan telaah empirik yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sesuatu yang akan dilakukan (Hallen, 2001). Dalam layanan Bimbingan dan Konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis tersebut berkenaan dengan hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya serta dalam proses penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling.

Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dapat berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan, yaitu:

Pertama, prinsip-prinsip pelaksanaan program bimbingan. Menurut Van Hoose (Prayitno, 2002) menyebutkan terdapat lima prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu (1) bimbingan berdasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri individu terkandung kebaikan-kebaikan, setiap pribadi mempunyai potensi, dan pendidikan hendaklah membantu mengembangkan potensinya itu, (2) bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik yang berbeda dengan yang lain, (3) bimbingan merupakan bantuan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat, (4) bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh ahli yang telah mengikuti latihan khusus, dan untuk melaksanakan layanan bimbingan diperlukan minat pribadi khusus pula.

Kemudian Shertzer & Stone (1981) mengemukakan enam prinsip bimbingan yang berfungsi sebagai parameter pelaksanaan bimbingan dan konseling, menggambarkan model operasional, dan menjelaskan asumsi-asumsi filosofisnya. Keenam prinsip tersebut, yaitu (1) bimbingan sangat utama bila difokuskan pada perkembangan individu, (2) model utama pelaksanaan bimbingan ditentukan oleh proses perilaku individu, (3) bimbingan diorientasikan pada kerjasama, bukan paksaan, (4) manusia memiliki kemampuan yang berkembang, (5) bimbingan didasarkan pada pengenalan harga diri dan nilai individu, serta hak mereka untuk memilih, dan (6) bimbingan bersifat berkelanjutan, urut dan proses pendidikan.

Sedangkan Belkin (Prayitno, 2002) merumuskan enam prinsip untuk menegakkan dan menumbuh kembangkan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di institusi pendidikan yaitu: (1) konselor harus memulai kariernya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut, (2) konselor harus tetap mempertahankan sikap profesional tanpa harus mengganggu hubungan antara konselor dan peserta didik dan petersonil sekolah lainnya, (3) konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata, (4) konselor bertanggung jawab kepada semua peserta didik, baik yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang kemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun bagi peserta didik yang memiliki bakat istimewa, yang berpotensi rata-rata, yang pemalu dan sebagainya, (5) konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu peserta didik-peserta didik yang mengalami masalah yang serius dan yang menderita gangguan emosional, dan (6) konselor harus bekerjasama secara efektif dengan kepala sekolah.

Kedua, prinsip yang berkaitan dengan pengembangan program bimbingan dikemukakan oleh Gysbers dan Haderson (2006) mengemukakan tujuh prinsip pengembangan program bimbingan dan konseling, yaitu (1) program bimbingan membantu perkembangan peserta didik dan memperhatikan perbedaan individualnya, (2) program bimbingan membantu peserta didik agar dapat hidup bekerjasama dalam suatu kelompok, (3) program bimbingan memberikan layanan kepada semua peserta didik di semua jenjang pendidikan, (4) program

bimbingan membantu semua peserta didik dalam mengembangkan pribadi, sosial, karier dan pendidikan, (5) program bimbingan menyediakan layanan konsultasi dan koordinasi bagi para guru, orang tua peserta didik, dan staf administrasi, (6) program bimbingan mengembangkan layanan preventif dan remedial bagi peserta didik, dan (7) program bimbingan ada dua macam, yaitu sebagai komponen integral dan komponen independen dari keseluruhan program pendidikan di sekolah.

Dari rumusan prinsip-prinsip pengembangan program Bimbingan dan Konseling oleh Gysbers dan Haderson di atas, maka dalam rangka penyusunan dan pengembangan program BK Sekolah yang komprehensif perlu diperhatikan dua langkah besar yang menjadi dasar kerja, yaitu: a) pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan; dan b) desain program yang sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan (Rahman, 2008).

Dari beberapa prinsip pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sebagaimana telah dikemukakan di atas disimpulkan sebagai berikut:

(1) Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan: (a) Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur jenis kelamin, suku, agama dan status sosial ekonomi. (b) Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan berbagai aspek perkembangan individu, serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan.

(2) Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu; bahwa bimbingan dan konseling berhubungan dengan pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya dirumah maupun disekolah, dan yang menjadi faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

(3) Prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan: (a) Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu; (b) Program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi.

(4) Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan: (a) Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu sehingga keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri. (b) Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

(5) Prinsip bimbingan dan konseling disekolah menegaskan bahwa penegakan terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya, mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya, memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu peserta didiknya, dan mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kepala sekolah.

-----ooo0ooo-----

5 Keadaan Fasilitas Bimbingan Dan Konseling Saat Ini

Pada bab I telah diuraikan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dari kualitas tenaga bimbingan dan konseling, namun dari segi sarana dan prasarana bimbingan dan konseling yang disiapkan oleh sekolah. Padahal sebagaimana diketahui bahwa ruang konseling berfungsi sebagai tempat bagi peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak lengkap akan berimbas juga kepada ketidaklengkapan sarana dan prasarana dalam pelayanan bimbingan dan konseling .

Banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana BK yang sangat minim sehingga guru BK kewalahan dalam melaksanakan program layanan bimbingan konseling disekolah terlebih sarana prasarana dalam bimbingan konseling yang terbilang memprihatinkan, dengan kondisinya sudah banyak yang rusak atau tidak bisa dipakai. Bahkan di beberapa sekolah hanya disediakan sebuah ruangan bimbingan konseling yang sempit sekaligus berfungsi sebagai gudang OSIS, lokasi ruangan bimbingan konseling yang berada dibelakang kantin juga dekat dengan keramaian, sehingga tidak dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik ketika melakukan proses konseling (Wunu, 2016). Pendapat lain juga mengatakan bahwa ruangan BK acap kali hanyalah ruangan-ruangan parasit yang menumpang pada ruang guru atau ruang tata usaha. Bahkan juga kadang kala gudang-

gudang yang tidak terpakailah yang kemudian disulap menjadi ruangan BK tanpa memperhatikan lagi standar ruang BK yang seharusnya (Riyadi, Tanpa Tahun).

Pernyataan tersebut di atas, sesungguhnya tidak asing bila dilihat kenyataannya yang terjadi dilapangan (di sekolah-sekolah atau madrasah), bahkan hampir di semua tingkatan atau jenjang pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai ke Perguruan Tinggi baik secara lokal, regional maupun nasional. Bahkan keberadaan ruang bimbingan dan konseling sebagai salah satu fasilitas yang mendukung pelaksanaan kinerja dan program bimbingan dan konseling dianggap belum memadai.

Padahal didalam kegiatan bimbingan dan konseling terdapat berbagai jenis layanan sebagai wujud nyata penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan yaitu peserta didik. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling sarasanya adalah untuk mengentaskan segala permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh peserta didik tersebut, sehingga merupakan layanan bimbingan dan konseling yang mampu mengemban fungsi tertentu dan pemenuhan fungsi tersebut sesuai harapan yang benar-benar dapat dirasakan oleh peserta didik sebagai sasaran dari layanan tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, antara lain: penelitian Fatchurahman dan Solikin (2018) bahwa untuk fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling baik sarana dan prasarana pada sekolah menengah atas di Kota Palangka Raya belum memadai atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ningsih (2014) dalam penelitiannya tentang motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di SMPN 40 Muaro Jambi

merekomendasikan bahwa layanan bimbingan dan konseling perlu memberikan fasilitas yang lebih baik lagi untuk menunjang keberhasilan program BK disekolah. Penelitian Susilowati (2014) menyebutkan bahwa tingkat kepuasan siswa terhadap layanan bimbingan dan konseling pada aspek fasilitas sarana pendukung BK sebesar 10%.

Penelitian Alfandi, dkk. (2016) hasil penelitiannya mengindikasikan dari kondisi kerja guru BK yang secara umum belum memadai, belum memadainya kondisi kerja tersebut terlihat dari fasilitas yang belum lengkap dalam ruangan kerja guru BK. Sedangkan hasil penelitian Putranti (2015) menunjukkan 1) ketersediaan ruang bimbingan dan konseling yang memadai sesuai standar yaitu berukuran 8 x 9 m, pada lima sekolah atau sebesar 50 % dari 10 sekolah yang menjadi subyek penelitian; 2) ketersediaan ruang khusus konseling dimiliki oleh delapan sekolah (80%) dari sepuluh sekolah; 3) faktor penghambat ketersediaan sarana bimbingan konseling yaitu faktor biaya dan keterbatasan lahan.

Hasil penelitian Intishar, dkk (tanpa tahun) menunjukkan bahwa tiga belas sekolah berada pada kategori tidak memenuhi standar(92,8%) dan satu sekolah berada pada kategori memenuhi standar (7,14%). Pada aspek ruang bimbingan dan konseling seluruh sekolah tidak memenuhi standar(100%). Pada aspek instrumen pengumpul data tiga belas sekolah berada pada kategori memenuhi standar(92,8%) dan satu sekolah tidak memenuhi standar(7,14%). Pada aspek kelengkapan penunjang teknis sepuluh sekolah memenuhi standar(71,4%) dan empat sekolah lainnya tidak memenuhi standar(28,6%). Pada aspek dokumen seluruh sekolah memenuhi standar(100%).

Fasilitas untuk kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di berbagai jenjang pendidikan secara umum kurang memadai, walaupun sebagian besar sarana dan prasarana sudah tersedia, namun kondisi yang dimiliki belum memenuhi standar, hal ini digambarkan sebagai berikut.

Dari segi prasarana, berupa ruangan BK luasnya cukup beragam di setiap sekolah/madrasah; ada yang luasnya = $4 \times 8 \text{ m}^2$, ada yang luasnya = $9 \times 8 \text{ m}^2$, ada yang luasnya = $3 \times 8 \text{ m}^2$, ada yang luasnya = $5 \times 8 \text{ m}^2$, ada yang luasnya = $8 \times 8 \text{ m}^2$, dan ada yang luasnya = $8 \times 8 \text{ m}^2$. Kondisi bangunan (fisik) ada yang permanen dan semi permanen, meskipun dikatakan permanen tapi kondisinya sangat memprihatinkan, karena bekas gudang yang difungsikan. Jumlah ruangnya ada yang hanya satu saja dan bersifat terbuka tanpa disertai pembatas. Ruang ini berfungsi sebagai ruang konsultasi/konseling/ ruang kerja konselor, ruang penerima tamu, ruang gudang dan ruang dokumentasi.

Disisi lain, juga ada ruangan yang mempunyai pembatas, tetapi pembatasnya dengan lemari dan itupun ada yang dibatasi satu lemari dan ada yang dua lemari. Ada juga ruangan yang terpisah-pisah letaknya, tetapi terbatas untuk kegiatan layanan konseling maupun konsultasi. Sedangkan letak ruang BK, ada yang berada di tengah-tengah antara ruang kepala sekolah, guru-guru dan tata usaha sekolah, ada yang berada diantara antar kelas-kelas, ada juga ruangnya dipojok/sudut sekolah tanpa disertai adanya pembatas.

Analisis observasi menunjukkan bahwa sarana merupakan salah satu penunjang dari kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Keberadaan sarana menjadi ujung tombak proses pemberian layanan bimbingan dan konseling yang efektif. hasil analisis temuan pada

beberapa sekolah menengah tersebut menunjukkan belum berstandarnya fasilitas yang dimiliki sekolah-sekolah tersebut. Beberapa sarana yang ditemukan antara lain ada yang hanya memiliki lemari 3 buah untuk menyimpan data (alat-alat teknik test dan teknik non test, sebagai alat pengumpul dan penyimpanan data), 1 Pasang kursi tamu, 2 buah komputer lengkap, 1 buah AC, 1 buah TV, 1 buah cermin hias, 1 buah kipas angin, 7 buah meja + kursi kerja konselor, 2 buah kotak sampah dan 9 buah pigura. Adapula sekolah yang hanya memiliki: meja guru 4 buah, kursi guru 8 buah, kursi tamu plastik 1 buah, papan data guru 2 buah, rak buku 1 buah, PC komputer 1 buah, 2 buah komputer lengkap, 1 buah AC, 1 buah TV, 1 buah cermin hias, 1 buah dispences, 1 buah kipas angin, dan 5 buah meja kerja serta lemari 5 buah lemari penyimpanan data (alat-alat teknik test dan teknik non test, sebagai alat pengumpul dan penyimpanan data).

Bahkan ditemukan juga sekolah yang sarana penunjang atau pendukung kegiatan layanan bimbingan dan konseling berupa 5 buah meja kerja, kursi kerja 7 buah, kursi tamu 1 set, papan data guru 1 buah, 1 buah TV, 1 buah cermin hias, 1 buah dispences, 1 buah kipas angin, dan lemari 2 buah untuk menyimpan data.

Dari penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, barangkali disebabkan oleh beberapa faktor-faktor, sehingga kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana bimbingan konseling, antara lain:

1. Masih adanya kurang perhatian dari pemerintah
2. Adanya pemisahan bimbingan dan konseling dari sistem institusi pendidikan dan dianggap tidak penting.
3. Kinerja konselor atau guru BK sering hanya focus pada permasalahan bersifat insidental.

4. Kepedulian Kepala Sekolah dianggap kurang terhadap pentingnya pengadaan ruangan bimbingan dan konseling yang nyaman baik bagi siswa maupun Guru BK.
5. Kurangnya publikasi mengenai bimbingan dan konseling, baik didalam maupun diluar sekolah.
6. Belum adanya kesepahaman dari berbagai pihak akan pentingnya pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar bagi bimbingan dan konseling disekolah.
7. Masih terdapat isu-isu yang berkembang bahwa bimbingan konseling tidaklah penting disekolah
8. Kurangnya inisiatif dan kreatifitas konselor untuk pengadaan sarana di dalam ruangan bimbingan konseling.

Padahal ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi hal yang penting, dengan lengkapnya berbagai sarana dan prasaran yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku, dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan siswa atau klien itu sendiri. Sesuai dengan tujuan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang diberikan kepada siswa (klien) yang secara khusus diarahkan untuk membantu siswa agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, produktif dan berperilaku jujur, sehingga siswa benar benar dapat berkembang lebih optimal. Pelayanan tersebut diantaranya: layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan mediasi, dan layanan konsultasi.

-----ooo0ooo-----

6 Konsep Revitalisasi Fasilitas Bimbingan Dan Konseling

A. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi secara harafiah berarti kegiatan untuk menyadarkan, menyegarkan kembali, menghidupkan kembali, atau membangkitkan kembali (Echols dan Shadily: 1992), dan secara terminologis bermakna sebagai “bringing again into activity and prominence” (<http://www.answers.com/topic/revitalization>) yang berarti untuk membawa kembali kepada aktivitas dan keunggulan subyek.

Danisworo (2002) menyebutkan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu hal yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Gouillart dan Kelly (1995) mendefinisikan revitalisasi sebagai upaya mendorong pertumbuhan dengan mengaitkan organisasi kepada lingkungannya”. Sedangkan Asbhy (1999) mengartikan revitalisasi adalah mencakup perubahan yang dilaksanakan secara *Quantum Leap*, yaitu lompatan besar yang tidak hanya mencakup perubahan bertahap atau incremental, melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal organisasi”.

Sementara itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia, revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan

apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali (Dewi, 2011).

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalize kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002).

Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa revitalisasi adalah suatu usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi utama dari yang seharusnya baik secara fisik maupun nonfisik, baik keseluruhan maupun sebagian untuk dapat berdaya guna sesuai dengan standar yang diinginkan.

B. Tujuan dan Fungsi Revitalisasi Fasilitas Pelayanan Bimbingan dan Konseling

1. Tujuan Revitalisasi

- a. Menambah gedung baru atau merehabilitasi gedung yang telah ada sebagai sarana prasarana, seperti ruang kerja konselor (dan konseling), ruang tamu, ruang TU, ruang perpustakaan, ruang BK kelompok, dan ruang relaksasi.

- b. Memfasilitasi guru BK (Konselor) dalam melakukan kegiatan berbagai jenis pelayanan bimbingan dan konseling.
- c. Menumbuhkembangkan semangat kerjasama secara kompetitif dikalangan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling.
- d. Membantu masyarakat belajar (guru dan siswa) dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Menyediakan tempat membaca (belajar) yang representatif.
- f. Memberikan kenyamanan bagi guru dan peserta didik dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling.
- g. Sebagai pusat pelayanan kegiatan dari bimbingan dan konseling.
- h. Membina dan mengembangkan sekolah sebagai pusat pelayanan pemberian bantuan kepada siswa (klien).
- i. Sarana interaksi antara siswa (klien) dengan guru.
- j. Wadah penyediaan informasi, inovasi dan pembinaan mental siswa (klien).
- k. Mengembangkan daya fisik siswa yang lebih aktif dan kreatif serta membutuhkan rasa percaya diri.

2. Manfaat Revitalisasi

- a. Terciptanya sekolah yang kondusif bagi masyarakat sekolah.
- b. Memacu seluruh komponen sekolah untuk belajar meningkatkan mutu dan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

- c. Tumbuhnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan diantara pihak sekolah dengan masyarakat pengguna.
- d. Bertambahnya koleksi buku perpustakaan guna memudahkan bagi siswa (klien) dalam memenuhi kebutuhan: baik pribadi, sosial, karir dan belajarnya.
- e. Terfasilitasinya guru dan siswa dalam melakukan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling secara praktis dan efektif.
- f. Meningkatnya minat siswa (klien) untuk selalu datang ke unit layanan bimbingan dan konseling.
- g. Meningkatnya mutu profesionalisme guru bk (konselor) dalam menjalankan tugasnya.
- h. Terciptanya keefektifan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.
- i. Terpeliharanya interaksi antara siswa (klien) dengan guru.
- j. Berkembangnya daya fisik siswa (klien) yang lebih aktif dan kreatif serta tumbuhnya rasa percaya diri.

C. Revitalisasi Fasilitas Pelayanan Bimbingan dan Konseling.

Revitalisasi bukanlah sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada di lingkungannya. Dalam usaha melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Keterlibatan tersebut bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas saja, tapi memerlukan adanya partisipasi seluruh komponen masyarakat secara luas, sehingga menjadi penting.

Dalam konteks revitalisasi fasilitas bimbingan dan konseling, sebagai sebuah kegiatan pelayanan yang sangat kompleks dalam rangka membantu mengentaskan segala permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka pengembangan diri siswa di sekolah, revitalisasi fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Intervensi fisik.

Mengingat citra pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah selama ini kurang baik dan masih belum terstandarnya fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling sesuai ketentuan ABKIN 2007 dan SNPI 2016 serta Permendikbud Nomor: 111/2014, maka sangat erat kaitannya dengan kondisi visual, khususnya dalam menarik perhatian pengunjung dari kegiatan pelayanan BK, sehingga intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dari kondisi fisik bangunan dan tata letak serta sistem pengelolaan ruang BK menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya menjadi memperhatikan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang dan akhirnya memiliki keberfungsian sosial bagi seluruh komponen sekolah. Jika secara fisik ruang bimbingan terpenuhi secara terstandar maka segala kegiatan nonfisik akan dapat berjalan dengan sesuai dengan mekanisme profesionalitas seorang konselor beserta seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut.

2. Intervensi nonfisik.

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat *beautiful place*. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan gedung atau ruang harus mampu menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) yang selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik. Disamping itu harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*).

Revitalisasi berupa non fisik dalam rangka pemberian layanan bimbingan dan konseling, diharapkan mampu mendorong guru bk (konselor) untuk berinovasi dan berkreasi dalam usaha pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan keamanan diri siswa, dan siswapun diharapkan mampu memiliki sikap untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya. Sesuai dengan tujuan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang diberikan kepada siswa (klien) yang secara khusus diarahkan untuk membantu siswa agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, produktif dan berperilaku jujur, sehingga siswa benar benar dapat berkembang lebih optimal.

Dengan demikian revitalisasi sebagai rangkaian dalam upaya untuk menata kembali suatu kondisi bangunan yang memiliki potensi dan nilai strategis dengan mengembalikan vitalitas suatu ruangan yang letaknya strategis, sehingga mendapatkan nilai tambah yang optimal

terhadap produktivitas kinerja konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan mampu mengentaskan permasalahan yang dihadapi para siswa dan mampu berkembang secara optimal sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya.

-----ooo0ooo-----

7 Standarisasi Fasilitas: Sarana Dan Prasarana Bimbingan Dan Konseling

Standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur (Arikunto, 2009:30). Standar dapat juga diartikan sebagai kriteria yang diperlukan untuk menjadi penentu agar hasil pengukuran berarti (Purwanto, 2009:3). Berdasarkan pendapat di atas tentang pengertian standar, maka dapat diartikan sebagai sebuah ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan hasil dari apa yang ingin diukur.

Dalam perspektif pendidikan nasional, bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan di sekolah, yang bertujuan untuk membantu para siswa agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal dan memperoleh kemandirian. *Agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai (Sudrajat, 2008).*

Sarana bimbingan dan konseling sebagai peralatan dan perlengkapan yang sangat penting dan dibutuhkan yang menunjang keterlaksanaan program bimbingan dan konseling (Gysbers, dkk. 2005:26). Sarana dan prasarana bimbingan dan konseling adalah peralatan dan perlengkapan yang menunjang tercapainya tujuan layanan bimbingan dan konseling (Kemendikbud, 2014:32). Dari pendapat tersebut di atas, sarana bimbingan dan konseling merupakan seluruh peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka memberikan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah.

Dalam Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang mengacu kepada Permendikbud tahun 2014 Nomor 111. Secara garis besar sarana dan prasarana bimbingan dan konseling terbagi menjadi empat bagian yaitu ruang bimbingan dan konseling, instrumen pengumpul data, kelengkapan penunjang teknis, dokumen program. Ruang bimbingan dan konseling terdiri dari ruang kerja sekaligus ruang konseling individual, ruang tamu, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang data. Instrumen pengumpul data terdiri dari instrument pengumpul data tes, intrumen pengumpul data non tes dan alat penyimpanan data.

Kelengkapan penunjang teknis terdiri dari alat tulis menulis, blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, agenda surat, buku-buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan, modul bimbingan, laporan kegiatan pelayanan, data kehadiran peserta didik, leger bimbingan dan konseling, buku realisasi kegiatan bimbingan dan konseling, bahan-bahan informasi pengembangan keterampilan hidup, perangkat elektronik (OHP, LCD), format pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi. Dokumen terdiri dari buku program tahunan, buku program semesteran, dan buku program harian.

Memperhatikan ketentuan tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana berupa ruang bimbingan dan konseling yang representatif sangat diperlukan, hal ini merupakan salah satu sarana penting yang dapat menunjang terhadap efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga diharapkan mampu menampung segenap aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling. Memperhatikan berbagai prinsip yang terkandung dalam bimbingan dan konseling, pengadaan ruang bimbingan dan konseling perlu mempertimbangkan

letak atau lokasi, ukuran, jenis dan jumlah ruangan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Letak atau lokasi ruang bimbingan dan konseling di suatu sekolah/madrasah dipilih lokasi yang mudah diakses (strategis) oleh konseli tetapi tidak terlalu terbuka. Dengan demikian seluruh konseli bisa dengan mudah dan tertarik mengunjungi ruang bimbingan dan konseling dan prinsip-prinsip *confidential* tetap terjaga. Nurihsan (2005) menyatakan bahwa pengaturan dan penataan fasilitas bimbingan hendaknya disesuaikan dengan fungsinya agar dapat menunjang efektifitas dan efisiensi kerja, sehingga dapat memberikan kenyamanan, keindahan, ketenangan agar orang dapat dengan betah dan merasa nyaman masuk pada ruangan tersebut. Lokasi pelayanan bimbingan dan konseling hendaknya dapat dijangkau dengan mudah oleh peserta didik dan tetap menjaga kerahasiaan klien.

Ruang bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan dan jumlah ruangan. Ruang kerja konselor disiapkan secara terpisah dan antar ruangan tidak tembus pandang dan suara. Jenis ruangan yang diperlukan antara lain; (1) ruang kerja sekaligus ruang konseling individual, (2) ruang tamu, (3) ruang bimbingan dan konseling kelompok, (4) ruang data, (5) ruang konseling pustaka (*bibliocounseling*), (6) ruang ruang relaksasi/desensitisasi, dan (7) ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2007). Adapun besaran ukuran ruangan disesuaikan dengan jumlah konseli/ konseli dan jumlah konselor yang ada di suatu sekolah/madrasah.

Ruangan kerja bimbingan dan konseling disiapkan agar dapat berfungsi mendukung produktivitas kinerja konselor, maka diperlukan

fasilitas berupa: komputer dan meja kerja konselor, dan almari, dan sebagainya. Disamping itu ruang administrasi/data perlu dilengkapi dengan fasilitas berupa: lemari penyimpanan dokumen (buku pribadi, catatan-catatan konseling, dan lain-lain) maupun berupa *soft copy*. Dalam hal ini harus menjamin keamanan data yang disimpan.

Ruangan konseling individual merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk terjadinya interaksi antara konselor dengan konseli. Ruang ini dilengkapi dengan satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblio terapi.

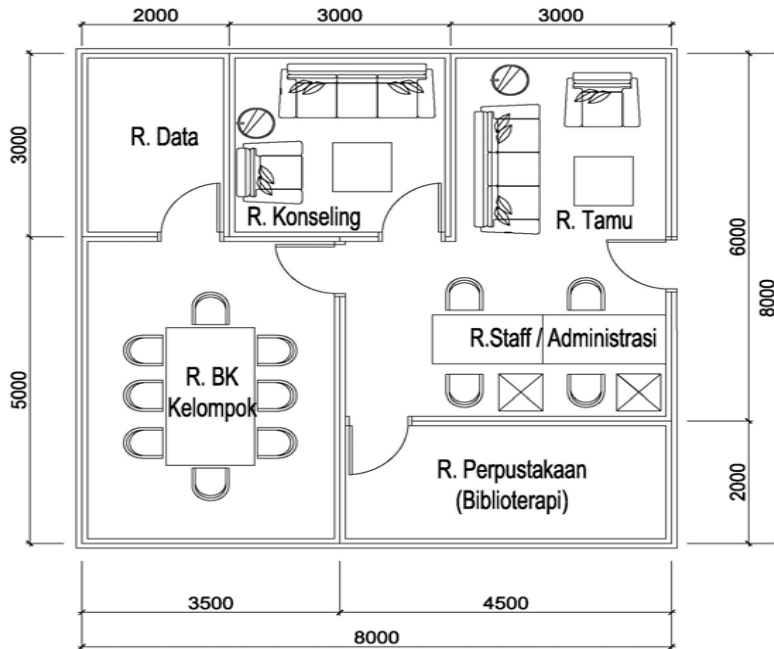
Ruangan bimbingan dan konseling kelompok merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara konselor dengan konseli dan konseli dengan konseli. Ruang ini dilengkapi dengan perlengkapan antara lain: sejumlah kursi, karpet, *tape recorder*, VCD dan televisi.

Ruangan biblioterapi pada prinsipnya mampu menjadi tempat bagi para konseli dalam menerima informasi, baik yang berkenaan dengan informasi pribadi, sosial, akademik, dan karir di masa datang. Karena itu selain menyediakan informasi secara lengkap, ruangnya pun mampu menampung banyak orang. Ruang ini dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut: daftar buku/ referensi (katalog), rak buku, ruang baca, buku daftar kunjungan siswa. Jika memungkinkan fasilitas pendukung seperti fasilitas internet.

Ruangan relaksasi / desensitisasi / sensitisasi, yang bersih, sehat, nyaman, dan aman. Jika memungkinkan ruangan ini dapat dilengkapi dengan karpet, *tape recorder*, televisi, VCD/ DVD, dan bantal. Ruang tamu hendaknya berisi kursi dan meja tamu, buku tamu, jam

dinding, tulisan dan atau gambar yang memotivasi konseli untuk berkembang dapat berupa motto, peribahasa, dan lukisan.

Secara ideal, gambaran penataan ruangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah (Depdiknas, 2007) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 6. 1: Penataan Ruang Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Keterangan:

- R. I : Ruang Data
- R. II : Ruang Konseling Individual
- R. III :Ruang Tamu
- R IV : Ruang bimbingan dan konseling kelompok
- R V : Ruang relaksasi
- R.VI : Ruang Kerja

Sedangkan BNSP (2006) memberikan gambaran yang berbeda tentang standar sarana yang terkait dengan ruang Bimbingan dan Konseling di sekolah, sebagai berikut :

1. Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
2. Luas minimum ruang konseling 9 m².
3. Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.
4. Ruang konseling dilengkapi berbagai sarana penunjang lainnya

Fasilitas ruangan yang diharapkan tersedia ialah ruangan tempat bimbingan yang khusus dan teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Ruangan itu hendaknya sedemikian rupa, sehingga di satu segi para konseli/konseli yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa nyaman, dan segi lain di ruangan tersebut dapat dilaksanakan pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Khusus ruangan konseling individual harus merupakan ruangan yang memberi rasa aman, nyaman dan menjamin kerahasiaan konseli.

Di dalam ruangan hendaknya juga dapat disimpan segenap perangkat instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data konseli, dan berbagai data serta informasi lainnya. Ruangan tersebut hendaknya juga mampu memuat berbagai penampilan, seperti penampilan informasi pendidikan dan jabatan. Pada prinsip fasilitas pelayanan, ruangan itu hendaklah nyaman yang menyebabkan para pelaksana bimbingan dan konseling betah bekerja, termasuk siswa yang memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Kenyamanan itu merupakan modal utama bagi kesuksesan program pelayanan yang disediakan.

Selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2007) antara lain:

1. Dokumen program bimbingan dan konseling (buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian)
2. Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi seperti:
 - a. Alat pengumpul data berupa tes yaitu: tes inteligensi, tes bakat khusus, tes bakat Sekolah/Madrasah, tes/inventori kepribadian, tes/inventori minat, dan tes prestasi belajar.
 - b. Alat pengumpul data teknik non-tes yaitu: biodata konseli, pedoman wawancara, pedoman observasi (seperti pedoman observasi dalam kegiatan pembelajaran, pedoman observasi dalam bimbingan dan konseling kelompok), catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, angket (angket konseli dan orang tua), biografi dan autobiografi, sosiometri, AUM, ITP, format satuan pelayanan, format-format surat (panggilan, referral), format pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi.
 - c. Alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. Alat penyimpan data itu dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map dan file dalam komputer. Bentuk kartu ini dibuat sedemikian rupa dengan ukuran-ukuran serta warna tertentu, sehingga mudah untuk disimpan dalam filing cabinet. Untuk menyimpan berbagai keterangan, informasi atau pun data untuk masing-masing konseli, maka perlu disediakan map pribadi. Mengingat banyak sekali aspek-aspek data konseli yang perlu dan harus dicatat, maka diperlukan adanya suatu alat yang dapat menghimpun data secara keseluruhan yaitu buku pribadi.

d. Kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan perlengkapan administrasi, seperti alat tulis menulis, blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, dan agenda surat, buku-buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan atau kursus-kursus, modul bimbingan, atau buku materi pelayanan bimbingan, buku hasil wawancara, laporan kegiatan pelayanan, data kehadiran konseli, leger Bimbingan dan Konseling, buku realisasi kegiatan Bimbingan dan Konseling, bahan-bahan informasi pengembangan keterampilan pribadi, sosial, belajar maupun karir, dan buku/bahan informasi pengembangan keterampilan hidup, perangkat elektronik (seperti komputer, tape recorder, film, dan CD interaktif, CD pembelajaran, OHP, LCD, TV); filing kabinet/ lemari data (tempat penyimpanan dokumentasi dan data konseli), dan papan informasi bimbingan dan konseling. Dalam kerangka pikir dan kerangka kerja bimbingan dan konseling terkini, para konselor Sekolah/Madrasah perlu terampil menggunakan perangkat komputer, perangkat komunikasi dan berbagai *software* untuk membantu mengumpulkan data, mengolah data, menampilkan data maupun memaknai data sehingga dapat diakses secara cepat dan secara interaktif. Perangkat tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah dewasa ini. Dalam konteks ini, para konselor dituntut untuk menguasai sewajarnya penggunaan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan oleh konselor dalam

upaya memberikan pelayanan terbaik kepada para konseli. Selain itu dengan menggunakan perangkat lunak komputer, konselor dapat memberikan pelayanan Bimbingan dan konseling secara lebih efisien, dan dengan daya jangkauan pelayanan yang lebih luas. Sebagai contoh perangkat lunak itu antara lain, program database konseli, perangkat ungkap masalah, analisis tugas dan tingkat perkembangan konseli, dan beberapa perangkat tes tertentu.

Komputer yang disediakan di ruang bimbingan dan konseling hendaknya memiliki memori yang cukup besar karena akan menyimpan semua data konseli, memiliki kelengkapan audio agar dapat dimanfaatkan setiap konseli untuk menggunakan berbagai CD interaktif informasi maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan masalah, serta kelengkapan akses internet agar dapat mengakses informasi penting yang diperlukan konseli maupun dimanfaatkan konseli untuk melakukan *e-counseling*.

Salah satu perangkat lunak yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling adalah Inventori Tugas Perkembangan (ITP). Pengolahan data secara komputerisasi memungkinkan kebutuhan konseli terdeteksi secara rinci sehingga dapat diturunkan menjadi program umum sekolah, program untuk tingkatan kelas maupun program individual setiap konseli. Kondisi ini memungkinkan karena data setiap konseli, data konseli dalam kelompok kelas, data konseli sebagai bagian dari tingkatan kelas maupun data seluruh sekolah/madrasah dapat ditampilkan.

Berbagai film dan CD interaktif sebagai bahan penunjang pengembangan keterampilan pribadi, sosial, belajar dan karir juga

harus tersedia, sehingga para konseli tidak hanya memperoleh informasi melalui buku ataupun papan informasi. (Depdiknas, 2007).

Di berbagai sekolah/madrasah baik negeri maupun swasta dari berbagai jenjang tingkatan seharusnya ada, penggunaan berbagai jenis pelayanan bimbingan dan konseling dan kegiatan pendukungnya, tentunya harus terlaksana secara seluruhnya, baik itu sarana dan prasarana serta didukung dengan adanya anggaran memadai. Sehingga konselor mampu menjalankan aktivitasnya sesuai dengan komitmen sebagai seorang konselor sekolah. Padahal Nurihsan (2005: 59) menyebutkan bahwa fasilitas dan pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam suatu program bimbingan dan konseling. karena itu siswa sangat membutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling yang menyediakan berbagai fasilitas sebagai upaya proaktif dan sistematis bagi siswa dalam rangka pencapaian kemandiriannya.

-----ooo0ooo-----

8 Upaya Pemenuhan Standarisasi Fasilitas Bimbingan Dan Konseling

Program pelayanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan di sekolah, penyelenggaraannya akan bisa terwujud apabila beberapa layanan yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual dan dukungan sistem bisa terpenuhi. Proses penyelenggaraa pendidikan, termasuk di dalamnya program bimbingan dan konseling tidak bisa dipisahkan dari aspek dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik, atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik (Yusuf dan Juntika, 2010:29). Dukungan sistem berupa sarana dan prasarana yang merupakan bagian penting dalam bimbingan dan konseling, harus mampu menciptakan kenyamanan bagi peserta didik dan guru bimbingan dan konseling (konselor) dan harus mampu menunjang keterlaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 nomor: 111 pasal 6 ayat 4 dan 5 dikemukakan bahwa layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan dalam dua jam per minggu dan tidak hanya fokus pada kegiatan di dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan diluar kelas. Kondisi ini membuat sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling harus lebih diperhatikan dan dipenuhi agar mampu menunjang keterlaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan layanan bimbingan dan

konseling di sekolah akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan, apabila didukung oleh fasilitas bimbingan dan konseling yang memadai (Sukardi, 2008:97). Sarana dan prasarana bimbingan dan konseling akan mempengaruhi keberhasilan layanan bimbingan dan konseling (Depdiknas, 2007).

Selanjutnya, secara garis besar sarana dan prasarana bimbingan dan konseling terbagi menjadi empat bagian yaitu ruang bimbingan dan konseling, instrumen pengumpul data, kelengkapan penunjang teknis, dokumen program. Ruang bimbingan dan konseling terdiri dari ruang kerja sekaligus ruang konseling individual, ruang tamu, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang data. Instrumen pengumpul data terdiri dari instrument pengumpul data tes, intrumen pengumpul data non tes dan alat penyimpan data. Kelengkapan penunjang teknis terdiri dari alat tulis menulis, blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, agenda surat, buku-buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan, modul bimbingan, laporan kegiatan pelayanan, data kehadiran peserta didik, leger bimbingan dan konseling, buku realisasi kegiatan bimbingan dan konseling, bahan-bahan informasi pengembangan keterampilan hidup, perangkat elektronik (OHP, LCD), format pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi. Dokumen terdiri dari buku program tahunan, buku program semesteran, dan buku program harian (Permendikbud No. 111 Tahun 2014).

Dalam usaha pemenuhan berbagai fasilitas bimbingan dan konseling, baik itu prasarana dan sarana. Prasarana dapat terdiri dari ruangan bk yang di dalamnya terdiri atas beberapa ruang beserta sarana terdiri dari beberapa peralatan penunjang lainnya. Maka sesuai dengan

beberapa hasil penelitian sebagaimana pada bab IV Keadaan Fasilitas BK Saat ini, aspek sarana dan prasarana bimbingan dan konseling harus mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak, yakni dinas pendidikan setempat, kepala sekolah, dan para guru, lebih khusus lagi guru BK (konselor). Untuk melakukan pengadaannya, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan pada berbagai pihak oleh konselor sekolah, diantaranya:

A. Mengintensifkan komunikasi dengan Kepala Sekolah.

Kepala sekolah mempunyai peran penting dalam usaha maju mundurnya suatu sekolah, baik sebagai administrator, motivator, leadership maupun supervisor, sehingga banyak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengambilan keputusan kepala sekolah mempengaruhi produktivitas sekolah, baik produktivitas fisik maupun nilai (Kuswardani, 2012). Semakin baik pengambilan keputusan kepala sekolah, maka semakin baik pula produktivitas dari sekolah tersebut. Kepala sekolah sesuai fungsinya sebagai supervisor sekolah memiliki beberapa tugas, salah satunya berusaha melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah termasuk media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan pembelajaran (Purwanto, 2004:8). Berdasarkan survei yang dilakukan di sekolah Provinsi Nova Scotia, kepala sekolah yang menghadiri pelatihan pelatihan di lembaga mengenai program bimbingan dan konseling komprehensif, memiliki peluang untuk keberhasilan pelaksanaan yang tinggi (Sumarah dan Lehr, 2002:16).

B. Melibatkan dunia usaha dan industri

Menyiapkan bahan penyusunan, penggandaan, mendistribusikan dan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana sekolah menengah. Pemberdayaan sarana dan prasarana (fasilitas) sekolah dimaksudkan untuk mengupayakan secara mandiri dari kekurangan atau pemenuhan kebutuhan fasilitas sekolah. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan perhatian semua pihak untuk andil memberikan kontribusinya termasuk dunia usaha/industri dalam membantu pengadaan fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling.

C. Melibatkan masyarakat; terutama orang tua siswa sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana sekolah. Dalam kenyataannya partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk bantuan dana bagi penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga secara garis besar partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pendidikan dikategorikan sebagai *home resources, commuity resources, school resources*.

D. Pelibatan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Ini dilakukan sebagai suatu kewajiban sebagai sumber suporting utama dalam mengatur keberlangsungan sekolah, baik proses maupun investasi (UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 10 dan 11), suporting tersebut meliputi: pengaturan melalui perundang-undangan/peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan, pendanaan dan atau pengadaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, perancangan dan pengembangan kerangka program, penetapan standar pelaksanaan, dan sebagainya.

Konselor dapat bekerja dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi apabila didukung oleh perangkat layanan yang memadai salah satunya

yaitu sarana dan prasarana bimbingan konseling. kegiatan layanan bimbingan konseling di sekolah akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan, apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu diantaranya adalah perlengkapan material yang berupa sarana fisik dan sarana teknis. Menurut Daryanto, sarana adalah alat yang secara langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan prasarana alat secara tidak langsung untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007, Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.

-----ooo0ooo----

9 Unjuk Kerja Konselor Sekolah

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Kemudian dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 di sebutkan bahwa: Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.

Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan ke empat kompetensi tersebut yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan pribadi yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pembentukan kompetensi akademik konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd) bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor, disingkat Kons.

Sehingga dengan demikian menurut Susanto (2008) ekspektasi kinerja konselor yang mengampu pelayanan bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga pengampu pelayanan profesional itu juga dinamakan “*the reflective practitioner*”.

A. Definisi Unjuk Kerja Konselor

Dalam proses pelaksanaan pekerjaan tentu akan memperoleh pengalaman yang berharga dan pengalaman itu akan selalu bertambah. Akumulasi dari pengalaman tersebut akan selalu mempengaruhi kualitas dan keberhasilan seseorang sehingga menjadikan kinerjanya meningkatkan. Kinerja merupakan kegiatan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan atau di jalankan oleh setiap individu dalam hubungannya dengan sesuatu yang telah di rencanakan sebelumnya. Rivai (2005) menyebutkan kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara Smith (Mulyasa 2007) menyatakan bahwa kinerja adalah “*output drive from processes, human or otherwise*”, jadi kinerja merupakan hasil dari suatu proses.

Kinerja atau yang disebut dengan *performance* dapat diartikan sebagai prestasi kerja, atas pelaksanaan dari pencapaian pekerjaan apa yang dikerjakan, itulah hasil-hasil kerja atau disebut juga unjuk kerja.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, unjuk kerja adalah sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja (Daryanto, 2005). Sementara itu Winkel (1991) menyebutkan bahwa konselor sekolah adalah tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus diperguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan.

Unjuk kerja profesional bagi konselor atau guru pembimbing pada dasarnya merupakan perwujudan profesional yang dilakukan secara sadar dan terarah untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling. Unjuk kerja secara profesional mencakup dimensi filosofis, konseptual, operasional dan personal. Prayitno (2004) keseluruhan unjuk kerja meliputi beberapa gugus yang masing-masing gugus terdiri atas sejumlah butir unjuk kerja. Masing-masing unjuk kerja tersebut merupakan kegiatan yang ditampilkan oleh seorang guru pembimbing dalam rangka pelaksanaan tugas atau pengembangan profesional bimbingan dan konseling. Selanjutnya masing-masing butir unjuk kerja itu dilengkapi dengan dasar-dasar teori keilmuan atau rasional, teknik-teknik khusus sarana serta perlengkapan pendukungnya. Sehingga butir unjuk kerja itu dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, pelaksanaan butir-butir unjuk kerja tersebut perlu ditunjang oleh sarana kerja nilai dan sikap, serta kemampuan khusus konselor sekolah.

Dengan demikian, tampaklah bahwa masing-masing butir unjuk kerja tersebut merupakan kegiatan yang cukup kompleks yang sekaligus terpadukan didalamnya unsur-unsur keilmuan, tehnik, nilai, sikap dan kemauan. Perwujudan tugas dan peranan tersebut berupa unjuk kerja pelayanan bimbingan. Unjuk kerja itulah yang menjadi

ukuran apakah konselor sekolah benar-benar telah melakukan sesuatu yang berharga dan yang diharapkan oleh sekolah yang selalu dinamis dan berkembang. Dengan demikian yang dimaksudkan unjuk kerja konselor sekolah adalah cara kerjanya konselor disekolah atau madrasah itu dalam mewujudkan tugas dan perannya pada pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.

B. Indikator Keberhasilan Unjuk Kerja Konselor

Dalam usaha memberikan kontribusi terhadap tugas dan peranan konselor di masa yang akan datang, dimana tugas-tugas dan peranan tersebut semakin berat dan bahkan dapat menjadi tantangan yang berat dalam pelaksanaannya, maka haruslah menjadi perhatian yang serius dan lebih matang dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Oleh karena itu Prayitno (2015: 360) memberikan rumusan tentang unjuk kerja itu mengacu kepada wawasan dan keterampilan yang hendaknya dapat ditampilkan oleh para lulusan program studi bimbingan dan konseling. Rumusan yang disampaikan oleh Prayitno tersebut sekaligus dapat dijadikan indikator keberhasilan unjuk kerja konselor.

Rumusan unjuk kerja tersebut meliputi 28 gugusan yang masing-masing terdiri dari atas sejumlah butir unjuk kerja. Keseluruhan 28 gugusan dari rumusan tersebut adalah:

- (1) Mengajar dalam bidang psikologi dan bimbingan dan konseling.
- (2) Mengorganisasikan program bimbingan dan konseling.
- (3) Menyusun program bimbingan dan konseling.
- (4) Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling.
- (5) Mengungkapkan masalah klien.

- (6) Menyelenggarakan pengumpulan data tentang minat, bakat, kemampuan, dan kondisi kepribadian.
- (7) Menyusun dan mengembangkan himpunan data.
- (8) Menyelenggarakan konseling perorangan.
- (9) Menyelenggarakan bimbingan dan konseling kelompok.
- (10) Menyelenggarakan orientasi studi siswa.
- (11) Menyelenggarakan kegiatan koekstrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (12) Membantu guru bidang studi dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa.
- (13) Membantu guru bidang studi dalam menyelenggarakan pengajaran perbaikan dan program pengayaan.
- (14) Menyelenggarakan bimbingan kelompok belajar.
- (15) Menyelenggarakan pelayanan penempatan siswa.
- (16) Menyelenggarakan bimbingan karier dan pemberian informasi pendidikan atau jabatan.
- (17) Menyelenggarakan konferensi kasus.
- (18) Menyelenggarakan terapi perpustakaan.
- (19) Melakukan kunjungan rumah.
- (20) Menyelenggarakan konseling keluarga
- (21) Merangsang perubahan lingkungan klien.
- (22) Menyelenggarakan konsultasi khusus.
- (23) Mengantar dan menerima alih tangan.
- (24) Menyelenggarakan diskusi profesional.

- (25) Memahami dan menulis karya-karya ilmiah dalam bidang bimbingan dan konseling.
- (26) Menyelenggarakan dan Memahami hasil penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling.
- (27) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling pada lembaga atau lingkungan yang berbeda.
- (28) Berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesi bimbingan dan konseling.

C. Evaluasi Kinerja Konselor di Sekolah

Kinerja seorang konselor dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling akan dapat dirasakan, apabila manajemen dari pelayanan bimbingan konseling dilaksanakan dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan bimbingan konselingsnya, dapat diwujudkan dalam perencanaan program bimbingan konseling, pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, penetapan staf bimbingan dan konseling, lalu menggerakkan atau meningkatkan Sumber Daya Manusianya untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan cara memberikan motivasi, dan terakhir melakukan evaluasi kegiatan serta hasil yang dicapai melalui aktivitas layanan yang telah dicapai.

Djamarah (2005: 37) berpendapat bahwa unjuk kerja konselor sekolah, tidak dapat diabaikan karena konselor sekolah harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat, dengan interaksi sosial, tidak sebatas dinding sekolah tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan

masyarakat. Konselor sekolah merupakan petugas profesional, artinya secara formal mereka telah disiapkan oleh lembaga atau institusi pendidikan yang berwenang. Mereka dididik secara khusus untuk menguasai seperangkat kompetensi yang diperlukan bagi pekerjaan bimbingan dan konseling.

Solehudin (2010) menyimpulkan bahwa: “ruang lingkup kinerja guru bimbingan konseling di sekolah meliputi aktivitas-aktivitas seperti, menyusun program bimbingan, mengumpulkan data dan mengolah data siswa, menyelenggarakan program informasi dan orientasi, menyelenggarakan pelayanan penempatan, menyelenggarakan konseling, menyelenggarakan pelayanan pelimpahan (referal), menyelenggarakan bimbingan kelompok dan bimbingan karier, menyelenggarakan pelayanan konsultasi bagi staf sekolah dan orang tua, menyelenggarakan hubungan masyarakat, mengorganisasikan dan mengadministrasikan pelaksanaan program bimbingan, mengembangkan kemampuan profesional, dan menyelenggarakan evaluasi dan pengembangan program”.

Untuk melihat sejauhmana program bimbingan dan konseling di sekolah telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan merupakan langkah penting dalam manajemen bimbingan dan konseling. Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan program bimbingan dan konseling di sekolah ini dilakukan sebagai upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria tertentu sesuai dengan program bimbingan yang ditetapkan.

Arikunto dan Abdul Jabar (2009) menyebutkan bahwa evaluasi program sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu

kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Dari pengetahuan tersebut suatu program bila sudah diketahui hasil kegiatannya sebagai suatu harapan yang diinginkan dari program tersebut jika hasilnya tidak memuaskan, maka dapat dicari dimana letak komponen yang kurang atau tidak berjalan dengan semestinya dalam mendukung pencapaian tujuan program.

Stufflebearn dan Shinkfield (2007) menyebutkan bahwa *“a program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation.* Dari konsep tersebut, evaluasi program merupakan suatu proses untuk mencoba menyesuaikan data obyektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap tujuan program (Suherman, 2013) yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terarah.

Dari pendapat tersebut, evaluasi program dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta, data dan informasi untuk mengumpulkan harga nilai evaluasi yang merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi.

Kemudian pendapat Mardapi menyebutkan bahwa *“evaluasi program adalah metode untuk mengetahui dan menilai efektivitas suatu program dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai (Mardapi, 2012).* Hasil yang dicapai dimaksudkan adalah berupa informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian jenis

atau model evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi program tergantung pada tujuan yang ingin dicapai pada program tersebut.

Selanjutnya Stake (2004) memandang bahwa *“Evaluation is the comparison of the condition or performen of something to one more standarts, the report of such a comparison.”* Evaluasi adalah perbandingan kondisi atau kinerja sesuatu untuk satu standart atau lebih. Dalam hal ini, Stake lebih menekankan kesesuaian antara suatu kondisi kerja yang biasa disebut kinerja dengan satu patokan, acuan atau standarisasi yang telah ditetapkan.

Senada dengan pendapat Stake, Worthen dan Sanders (2004) *“Evaluation as the identification, clarification and application of defensible creteria to determine an evaluation object’s value (worth and merit) in relation to those criteria.”* Evaluasi program adalah sebagai identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan nilai dari suatu obyek evaluasi (berupa nilai dan manfaat) dalam kaitannya dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk keberhasilan program. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian target program.

Sementara itu Kirkpatrik (2010) menambahkan ada tiga alasan mengapa diperlukan evaluasi program, yaitu: (1) untuk menunjukkan eksistensi dan dana yang dikeluarkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program yang dilakukan, (2) untuk memutuskan apakah kegiatan yang dilakukan akan diteruskan atau dihentikan, (3) untuk mengumpulkan informasi bagaimana cara untuk mengembangkan program di masa mendatang.

Dari berbagai definisi evaluasi program di atas ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauhmana keberhasilan sebuah program dengan menerapkan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai sebuah rancangan, selanjutnya menyajikan berbagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Fatchurahman (2017) menyebutkan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling dapat mencapai hasil yang efektif bilamana dimulai dari adanya program yang disusun dengan baik. Program berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. Karena itu pelaksanaan program tersebut merupakan wujud nyata dari di selenggarakannya kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling itu sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui keefektivan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Namun secara khusus pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja konselor dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling menurut Tohirin (2014) dan Rahayu (2012) bertujuan untuk:

- a. Meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
- b. Memperkuat asumsi atau perkiraan yang mendasari pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
- c. Mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan sehingga perlu diadakan perbaikan dan perkembangan.

- d. Mengetahui sampai sejauhmana keterlibatan semua komponen sekolah dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
- e. Memperoleh gambaran sampai sejauh mana peranan masyarakat terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
- f. Mengetahui sampai sejauh mana kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap pencapaian tujuan pendidikan pada umumnya, TIK dan TIU pada khususnya.
- g. Mendapatkan informasi yang akurat dalam rangka perencanaan langkah-langkah pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling.
- h. Membantu mengembangkan kurikulum sekolah untuk kesesuaian dengan kebutuhan.

Sementara itu Fatchurahman (2017) mengemukakan bahwa suatu program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria keberhasilan yang telah di tetapkan (sebagai contoh dapat dilihat pada [umpalangkaraya.ac.id/.../fatchurahman/.../KONSEP-DASAR EVALUASI-PROGRAM-atau](http://umpalangkaraya.ac.id/.../fatchurahman/.../KONSEP-DASAR-EVALUASI-PROGRAM-atau) [https://www.scribd.com/document/359119708/Isi-Buku-Bimbingan Konseling-Cetak](https://www.scribd.com/document/359119708/Isi-Buku-Bimbingan-Konseling-Cetak)).

Hal ini digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah apakah telah terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan siswa dan pihak-pihak yang terlibat membantu siswa dalam memperoleh perubahan perilaku dan pribadnyai ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian kriteria evaluasi program disini merupakan patokan sebagai tolak ukur atau standar yang digunakan untuk

mengukur kondisi obyek yang akan dinilai. Kriteria dapat menunjukkan suatu tingkatan atau atau jenjang dalam bentuk kata keadaan atau predikat. Untuk menentukan kriteria tersebut tentu harus melihat pada variabel dan indikator dari apa yang akan diukur, dalam hal ini untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja seorang konselor tentu berdasarkan pada indikator keberhasilan unjuk kerja konselor sebagaimana pada point B di atas pada bab ini.

-----ooo0ooo----

10 Kesimpulan

Dalam proses pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, keberadaan fasilitas untuk efektivitas pelayanan tidak dapat diabaikan. Keberhasilan dari proses itu sangat sekali ditentukan oleh eksistensi fasilitas tersebut. Revitalisasi yang harus dilakukan demi mewujudkan hal tersebut adalah dengan terpenuhinya 7 (tujuh) komponen fasilitas utama yaitu; (1) ruang kerja, (2), ruang administrasi/ data, (3) ruang konseling individual, (4) ruang bimbingan dan konseling kelompok, (5) ruang biblioterapi, (6) ruang relaksasi/ desensitisasi, dan (7) ruang tamu. Selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling antara lain: (1). Dokumen program bimbingan dan konseling (buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian), (2). Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi. Dengan semakin terpenuhinya fasilitas pelayanan bimbingan dan konseling, baik berupa sarana dan prasarana, maka kinerja konselor di sekolah lebih meningkat lagi diiringi dengan adanya inovasi dan kreativitas yang tinggi.

-----ooo0ooo-----

Daftar Pustaka

- Ahmad, S. 2016. *Layanan Mediasi*. <http://syawalahmadbk.blogspot.Com/2016/06/layanan-mediasi.html>. Diakses tanggal 15 Mei 2018.
- Alfandi , Bahri, S. Husen, M. (2016). Motivasi Kerja Guru BK di SMA Negeri Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Unsyiah*. Volume 1 No. 1
- Anggraini,C.M.(2016). *Konselor*. <http://citramanggraini.blogspot.co.id/2016/12/konselor.html>. Diakses tanggal 10 Desember 2017.
- Arikunto, S. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. dan Abdul Jabar, C. S. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Paraktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ashby, M. (1999). Pengaruh Pembebanan Terhadap Perilaku Mekanik Komposit Polimer yang Diperkuat Serat Alam. *Jurnal Dinamis*, 2(4):2167492.
- Brown, D., & Trusty, J. (2005). The ASCA National Model, Accountability, and Establi-dhing Causal Links Between School Counselors Activities and Student Outcome”: A Reply ti Sink, *Journal Proafesional School Counseling*, Vol. 9, n1, p13, Oct 2005.
- Daniaty, A. (2012). *Evaluasi Bimbingan Konseling*. Pekanbaru, Riau: Zanafa Publishing.
- Danino, M. & Zippi Shechtm, Z. (2012). Superiority of group counseling to individual coaching for parents of children with learning disabilities, *Journal Psychotherapy Research*, September 2012; 22(5): 592-603.

- Danisworo, M. dan Martokusumo, W. (2002). *Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*. www.urdi.org (urban and regional development institute, 2000). Diakses 15 Desember 2012.
- Daryanto. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo
- Depdiknas. (2007). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Depdiknas. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor*. Jakarta: Depdiknas R.I.
- Depdikbud. (2014). *Permendikbud R.I., Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 8 Oktober 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Dewi (2012). Pengertian Revitalisasi. <https://dewiultralight08.wordpress.com/2011/03/10/pengertian-revitalisasi/> Diakses tanggal 9 Juni 2018.
- Dogar, A. H. et.al., (2011). Need Assessment of Students' Guidance and Counseling, *British Journal of Arts and Social Sciences*, ISSN: 2046-9578, Vol.1 No.2.
- Djamarah, S. B. (2005). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djumhur, I. dan Surya, Moh. (2008). *Bimbingan Dan Penyuluhan Konseling di Sekolah*. Bandung: Rineka Cipta.
- Echols, John M. & Shadily, H. (1992). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Fatchurahman, M. (2017). *Dasar-Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling*. Palangka Raya: Lembaga Literasi Dayak.
- Fatchurahman, M. dan Solikin, A. (2018). Facilities revitalization of mentoring and counseling services at secondary school level. *International Journal of Multidisciplinary Education and Research*. Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 96-99 .
- Fathurrohman, P. (2014). *Urgensi Bimbingan dan Konseling Di Perguruan Tinggi* Bandung: Refika Aditama.
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. & Worthen, B. R. (2004). *Program Evaluation: Alternatives Approach and Practical Guidelines*. Boston: Pearson Education Inc.
- Furqon dan Aip Badrujaman, A. (2014). *Model Evaluasi Layanan Dasar Berorientasi Akuntabilitas*. Jakarta: Indeks.
- Gouillart, F. J and Kelly, J. N. (1995). *Transforming the Organization*. New York: McGraw-Hill.
- Gysberg, Norman C. & Henderson, P. (2006). *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria: American Counseling Association.
- Hallen. (2002). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Liputan Press.
- Intishar, F. Chanum, I.. Badrujaman, A. (2015). Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling (Survei Terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Barat). *INSIGHT: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 2015. Vol. 4, No.1 Hal. 25-31.
- Kosasih, R. & Soejipto. (2009). *Profesi Keguruan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Kuswardani, I. (2012). *Hubungan Antara Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah dengan Produktivitas Sekolah*.
- Kirkpatrik, D. L., Kirkpatrik, J. D. (2010). *Evaluation Training Programs: Thr Four levels* San Francisco: Berrett Koehler Publishershinc.
- Larrabee, M.J., & Terres, C. K. (1984). Groups: The future of school counseling. *The School Counselor*, 31, 256-263.
- Mittendorff, et.al. (2012). The influence of teachers' career guidance profiles on students' career competencies, *Journal of Vocational Education and Training*, 2012, pp. 1–19.
- Mulyasa. (2007). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks menyukseskan MBS dan KBK*. Bandung: Rosda Karya.
- Ningsih, G. (2014). *Motivasi Siswa Dalam Memanfaatkan Layanan Bimbingan dan Konseling di SMPN 40 Muaro Jambi*. Jambi: FKIP Universitas Jambi.
- Nurihsan, A. J. (2012). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Reflika Aditama.
- Nurihsan, A. J. (2005). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. (2006). *Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. (2008). *Nomor 27 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor*. Jakarta: Depdiknas R.I.
- Prayitno, (2003). *Wawasan dan Landasan BK (Buku II)*. Jakarta: Depdiknas R.I.

- Prayitno dan Amti, E. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno dan Amti, E. (2014). *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Prayitno dan Amti, E. (2015). *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Putranti, D. (2015). Studi Deskriptif tentang Sarana dan Prasarana Bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Psikopedagogia*. 2015. Vol. 4, No. 1
- Rahayu, R. P. (2012). evaluasi bimbingan konseling. <http://purichemedu.blogspot.com/2012/11/evaluasi-bimbingan-konseling.html>. Diakses tanggal 22 April 2018.
- Purwanto. (2009). *Evaluasi hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto. (2004). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda
- Rahman, F. (t.t). *Modul Ajar Pengembangan dan Evaluasi Program BK*. Pendidikan Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling/Konselor (PPGBK). Yogyakarta :Program Studi BK Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahman, F. (2008). *Penyusunan Program BK di Sekolah*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ratna Sari, E., dkk. (2013). Resistor Factor Implementation Guidance and Counseling Program in High School of The Metro city.” *Jurnal Bimbingan Konseling*, 2013, ISSN: 1693-7856, Vol 2, No 3, hh. 90-101

- Riyadi, M. (2014). Profesionalisme Bimbingan dan Konseling Di Sekolah.
<https://riyadiscorpio.wordpress.com/2014/01/03/profesionalisme-bimbingan-dan-konseling-di-sekolah/> Diakses Tanggal 15 Mei 2018.
- Rusmana, N. (2009). *Bimbingan dan Konseling Kelompok Di Sekolah (Metode, Teknik, dan Aplikasi)*. Bandung: Rizki Press
- Salahudin, A. (2010). *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shertzer, Bruce. & Stone, S. C. (1981). *Fundamental of Guidance (4th Ed)*. Boston: Houghton Mifflin Comp.
- Sherril B. Gelmon, S. B., Foucek, A. & Waterbury, A. (2005). *Program Evaluation: Prinsiples and Practices*. Prtland: Northwest Healt Foundation.
- Sudrajat, A. (2008). Landasan Bimbingan dan Konseling.
<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/25/landasan-bimbingan-dan-konseling/> Diakses tanggal 22 Pebruari 2018.
- Sudrajat, A. (2008). *Tujuan Bimbingan dan Konseling*.
<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/14/tujuan-bimbingan-dan-konseling/> Diakses tanggal 22 Pebruari 2018.
- Sudrajat, A. (2008). *Fungsi, Prinsip, dan Asas Bimbingan dan Konseling*.
<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/14/fungsi-prinsip-dan-asas-bimbingan-dan-konseling/> Diakses tanggal 22 Pebruari 2018.
- Sudrajat, A.. (2008). *Standar Ruang Bimbingan dan Konseling*.
<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/05/standar-ruang-bimbingan-dan-konseling/> Diakses 5 Mei 2018.

- Sudrajat, A.. (2008). Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/07/08/jenis-layanan-bimbingan-dan-konseling/> Diakses 5 Mei 2018.
- Suherman, U. (2013). *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rizqi Press.
- Sukardi, D. K. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Rineka Cipta,
- Sumarah, J. & Lehr, R. (2002). *Catching The Vision: Guidance and Counseling In Nova Scotia's School*. Canada: Canadian Counseling and Psychotherapy Association.
- Susanto, E. (2008). *Standar Kompetensi Konselor*. <https://eko13.wordpress.com/2008/03/18/standar-kompetensi-konselor/> Diakses 5 Mei 2018.
- Susilowati, A. (2014). Kepuasan Siswa Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di SMKN 1 Badegan Ponorogo. *Jurnal Hisbah*, Vol. 11, No. 1, Juni 2014.
- Surya, M.. (2006). *Profesionalisme Konselor dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (makalah)*. Majalengka : Sanggar BK SMP, SMA dan SMK.
- Stake, R. E. (2004). *Standarts-Based & Responsive Evaluation*. California: Sage Publica-tion Inc.
- Stiyowati, S. (2013). Hubungan antara persepsi siswa terhadap pribadi konselor dan fasilitas BK dengan minat siswa untuk memanfaatkan layanan konseling di sekolah". *Jurnal BK UNESA*. Vol.03 No.01.
- Stufflebearn, D. L. dan Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, & Applications*. San Francisco: Published by Jossey-Bass.

- Tohirin. (2012). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tohirin. (2014). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang R.I. (2003). *Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
- Veithzal, R. dan Fawzi Ahmad. (2005). *Performance Appraisal: Sistem yang tepat untuk menilai kinerja karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Willis, S. W. (2004). *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- Winkel, W.S. (1991). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*: PT. Grasindo. Jakarta.
- Wunu, Y. (20016). *Problematika Sarana dan Prasarana BK disekolah*. <http://guidanceandcounselingyantiwunu.blogspot.co.id/2016/05/12.html>. Diakses 15 Mei 2018.
- Yusuf, S dan Nurihsan, A. J. (2010). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosdakarya

GLOSARIUM

| | |
|------------|---|
| Pendidikan | : Usaha yang dilakukan secara terencana dan terus menerus secara sadar sehingga mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan benar, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian dan berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan. |
| Bimbingan | : Bantuan yang diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. |
| Konseling | : Hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antarab dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. |
| Kompetensi | : Kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam |

- melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya.
- Konselor : Tenaga profesional yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan.
- Revitalisasi : Suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.
- Profesional : Istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya.
- interpersonal : Adanya komunikasi secara langsung atau face to face communication pada waktu dan tempat yang sama.
- Paedagogis : Ilmu atau seni mengajar anak-anak, proses pembelajaran terpusat pada guru atau pengajar. Andragogis adalah ilmu atau seni mengajar orang dewasa, proses pembelajaran terpusat pada peserta didik.

| | |
|--------------|--|
| Komprehensif | :Segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, meliputi seluruh aspek, atau meliputi ruang lingkup yang luas. |
| Orientasi | : Merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. |
| Responsif | : Layanan bimbingan dan konseling yang bersifat responsif, yaitu membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. |
| Advokasi | : Ekerjaan sosial yang bersifat eksklusif dan menguntungkan klien yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi sistem pembuatan keputusan yang terkadang tidak adil dan tidak responsif. |
| Mediasi | : Suatu kegiatan yang mengantarai atau menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah. |
| Observasi | : Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. |

Intervensi : Aktivitas pengendalian atau pun mempengaruhi dengan tujuan menciptakan “keadilan” atau pun mendapatkan keuntungan dari yang diintervens

INDEKS

- Akademik, 23, 24, 27, 31, 74,
84, 85
- Aktif, 1, 4, 20, 24, 32, 47, 68,
89, 103, 104
- Aktivitas, 1, 106
- Alternatif, 38
- Altruistik, 84, 85
- Asesmen, 29, 103
- Defensif, 35
- Dinamika, 32, 36, 52, 70, 74
- Dinamis, 16, 17, 60, 87
- Drop-out, 56
- Eksistensi, 5, 92, 95
- Ekspektasi, 84
- Eksplorasi, 32, 51
- Evaluasi, 2, 3, 13, 44, 51, 55,
56, 72, 77, 81, 82, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 99
- Filosofis, 10, 18, 56, 86
- Fleksibel, 59
- Harmonis, 12, 21, 31, 54, 60
- Infrastruktur, 40
- Institusi, 57, 64, 70, 90
- Interaktif, 77, 78, 79
- Intervensi, 17, 69
- Komponen, 3, 7, 26, 28, 29, 40,
58, 68, 69, 70, 80, 90, 93, 95
- Komprehensif, 8, 26, 27, 28,
29, 59, 82
- Komunikasi, 12
- Konklusif, 16, 18, 53, 68
- Konflik, 12, 24, 31, 35
- Konseling, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 18,
22, 26, 29, 34, 35, 36, 38, 45,
46, 49, 56, 58, 65, 67, 69, 72,
98, 99, 100, 103, 104
- Konselor, 4, 16, 33, 39, 47, 53,
67, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 96,
97, 99, 101, 103, 105
- Konsisten, 43
- Konsultasi, 6, 34, 36, 37, 46,
52, 58, 63, 65, 72, 77, 81, 88,
90
- Kriminalitas, 30
- Kualifikasi, 2, 84
- Kuratif, 17, 18, 33, 35
- Mediasi, 6, 46, 52, 53, 54, 65,
96
- Motivasi, 11, 30, 50, 62, 89
- Nasional, 46, 61, 71, 84
- Nasional, 82, 83, 97, 99, 102
- Observasi, 3, 42, 63, 76

Optimal, *1, 6, 15, 16, 18, 23, 41, 45, 46, 55, 65, 70, 71, 104*

Orientasi, *6, 16, 32, 46, 47, 59, 65, 88, 90*

OSIS, *61*

Parameter, *57*

Pedagogik, *85*

Persepsi, *9, 19, 49, 101*

Personel, *8, 16, 45*

Perspektif, *46, 71*

Petrsonil, *58*

Preventif, *18, 33, 35, 58*

Produktif, *6, 17, 65, 70, 84*

Profesioanal, *90*

Profesional, *4, 9, 13, 22, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 58, 60, 84, 85, 86, 89, 105*

Realisasi, *72, 77, 81* Referral, *37, 38, 77, 90*

Remedial, *17, 34, 58*

Responsif, *28, 33, 40, 80, 106*

Revitalisasi, *6, 7, 66, 67, 69, 71, 97, 105*

Sistematis, *1, 13, 16, 29, 79, 92, 106*

Spesifik, *34*

Stereotipe, *12*

Struktural, *36*

Virtual, *14*

Vitalitas, *66, 71*

Wasilah, *53, 106*

BIODATA PENULIS



Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi. lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 5 Agustus 1966, merupakan anak ke dua dari enam Bersaudara dari Bapak H. M. Ichsan Munawar (Alm) dan Ibu Hj. Siti Yusufah Riana (Alm). Pada tahun 1995 menikah dengan Hj. Norhayati, M.Pd. berprofesi sebagai guru PNS diperbantukan pada M.Ts. Islamiyah Palangka Raya, dikarunia 3 orang anak putra, yaitu: (1) Muhammad Nur Fathan (2) Aldi Firdaus (3) Muhammad Tirto Ardiyanto.

Riwayat pendidikan, penulis menyelesaikan pendidikan di SD Inpres Kotawaringin Hulu tahun 1981, MI Najmul Huda Kotawaringin Lama tahun 1981, SMP KNPI Kotawaringin Lama tahun 1984, SPG PGRI Pangkalan Bun tahun 1987, S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FKIP UM Palangkaraya tahun 1993, S2 Psikologi Untag Surabaya tahun 2012, S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang tahun 2012 dan S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2016.

Penulis mengawali karir menjadi Pegawai Negeri Sipil diperbantukan sebagai Guru SMA Muhammadiyah Palangka Raya sejak tahun 1994 sampai tahun 2002. Tahun 2002 pindah (mutasi) menjadi dosen pada program studi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya sampai sekarang. Pernah sebagai: Staf BAU UM Palangkaraya sejak tahun 1989-1994, Kabag. Umum dan Perlengkapan BAU UM Palangkaraya tahun 1994-1997, Kepala BAU UM Palangkaraya tahun 1997-2007, Sekretaris Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya tahun 2007-2008, Dekan FKIP UM Palangkaraya tahun 2012-2016 dan sekarang menjabat sebagai Kepala LP3MP UM Palangkaraya sejak tahun 2016.

Sebagai Dosen PNS Kopertis Wilayah XI Kalimantan dpk pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Mengajar di Program Sarjana (S1) Program Studi Bimbingan dan Konseling, dengan mata kuliah: Pemahaman Individu I/Asesmen Psikologis Teknik Non Tes; Perkembangan Individu; Pengembangan Pribadi Konselor; Metodologi Penelitian Dalam BK; Dasar-Dasar BK; PPL BK; Selain itu penulis telah menulis buku: Dasar-Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling (2017). Penulis juga mengajar pada Program Studi: PGSD, PGMI, dan mengajar pada Program Pascasarjana (S2) IAIN Palangka Raya.

BIODATA PENULIS



Dr. Asep Solikin, M.A lahir di Indramayu 22 Oktober 1978. Putra dari pasangan Asmawi dan Asmanah. Mendapat gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam dari STAI La Tansa Mashiro pada tahun 2004. Lalu melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk menggeluti Psikologi Pendidikan Islam dan mendapat gelar Magister Agama pada tahun 2006. Pendidikan Doktor ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan mendapat gelar Doktor bimbingan dan Konseling pada tahun 2011.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Kalimantan Tengah. Selain itu penulis aktif sebagai penggiat dakwah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palangka Raya. Keterlibatan penuh juga dilakukan oleh penulis sebagai tim edukasi masyarakat Anti Narkoba di kota Palangkaraya dan BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

Penulis aktif dalam penelitian dan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kalimantan Tengah. Beberapa tulisan penulis antara lain; Bimbingan Spiritual Berbasis Nilai-Nilai Budaya, Biblioterapi Sebagai Sebuah Teknik Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling, Model Konseling Keterampilan Hidup Dalam Meningkatkan Kemampuan Hubungan Sosial Santri.

Revitalisasi Fasilitas

Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Buku Revitalisasi Fasilitas Bimbingan dan Konseling di Sekolah menjadi sangat penting dan menarik untuk dibaca baik untuk siswa maupun praktisi dibidang pendidikan.

Pada dasarnya buku ini membahas tentang bagaimana pemberian bimbingan *konselor* (pembimbing) kepada *konsoli* (individu) secara tepat, dengan tujuan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan *konsoli* dalam memahami pelajaran, serta seberapa cepat *konsoli* dapat memecahkan semua masalah yang sedang dihadapi di sekolah.

Proses pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas masih kurang maksimal sehingga sangat diperlukan sebuah revitalisasi demi terwujudnya keberhasilan proses pendidikan. Oleh sebab itu buku ini menyoroti dengan jelas kepada pembaca tentang komponen-komponen yang harus dipenuhi di sekolah.

Published By;



Office:

Jl. A. Yani Gg. Sokajaya 59 Purwokerto
New Villa Bukit Sengkaling C9 No.1 Malang
HP. 081 357 217 319 WA. 089 621 424 412
www.irdhcenter.com
email: irdhresearch@gmail.com

ISBN 978-602-6672-79-7

